



SEKRETARIAT

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110

Telp : 021-3912812

Faks : 021-3912-511 dan 021-391-2513

E-Mail : sekretariat@tnp2k.go.id

Website : www.wapresri.go.id



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH **PROVINSI SULAWESI SELATAN**



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH **PROVINSI SULAWESI SELATAN**



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

**Judul: Indikator Kesejahteraan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan**

Disusun dan Diterbitkan oleh:
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Cetakan Pertama, November 2011

Hak Cipta dilindungi Undang-undang.
© 2011 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Foto Cover: mycelular.org, hutbunkabwajo.blogspot.com

Korespondensi : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021-3912812
Fax. 021-3912-511 dan 021-391-2513
E-mail: sekretariat@tnp2k.go.id
Website: www.wapresri.go.id



DAFTAR SINGKATAN

ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
AKB	: Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup
APK	: Angka Partispasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
BLM	: Bantuan Langsung Masyarakat
BPS	: Badan Pusat Statistik
CFSI	: <i>Composite Food Security Index</i>
DKP	: Dewan Ketahanan Pangan
FIA	: <i>Food Insecurity Atlas</i>
FSVA	: <i>Food Security and Vulnerability Atlas</i>
HDI	: <i>Human Development Index</i>
IPKM	: Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
MA	: Madrasah Aliyah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTS	: Madrasah Tsanawiyah
NTP	: Nilai Tukar Petani
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
SAKERNAS	: Survey Angkatan Kerja Nasional
SD	: Sekolah Dasar
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SUSENAS	: Survey Sosial Ekonomi Nasional
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
WFP	: <i>World Food Programme</i>



DAFTAR ISI

Daftar Singkatan.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar.....	vi
Pertumbuhan Ekonomi.....	1
Inflasi.....	4
Nilai Tukar Petani.....	5
Tingkat Kemiskinan	6
Indikator Kemiskinan	7
Program Penanggulangan Kemiskinan	8
Tingkat Pengangguran dan Ketenagakerjaan.....	9
Bidang Kesehatan	11
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat.....	15
Bidang Pendidikan.....	17
Akses Terhadap Air Bersih	19
Akses Terhadap Sanitasi.....	20
Indeks Pembangunan Manusia.....	21
Komponen Indeks Pembangunan Manusia	22
Ketahanan Pangan.....	23
Prioritas Bidang Pendidikan	27
Prioritas Bidang Kesehatan.....	29
Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar	32
Prioritas Bidang Ketenagakerjaan	35
Bidang-Bidang Prioritas Kesejahteraan Rakyat	36
PNPM Mandiri.....	38
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	40
Anggaran Pembangunan Daerah	43



DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2008 – 2009
- Tabel 2. Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2008 – 2010 (Jiwa)
- Tabel 3. Kontribusi Masing-masing Sektor Terhadap PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja, Tahun 2008-2009 (Persen)
- Tabel 4. Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2010
- Tabel 5. Indikator Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009 dan 2010
- Tabel 6. Indikator Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Tabel 7. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Tabel 8. Indikator Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Tabel 9. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2008 - 2009
- Tabel 10. Komponen Indeks Komposit Ketahanan Pangan, Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Tabel 11. Prioritas Intervensi Menurut Kabupaten Kota
- Tabel 12. Komposisi BLM PNPM Mandiri Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011

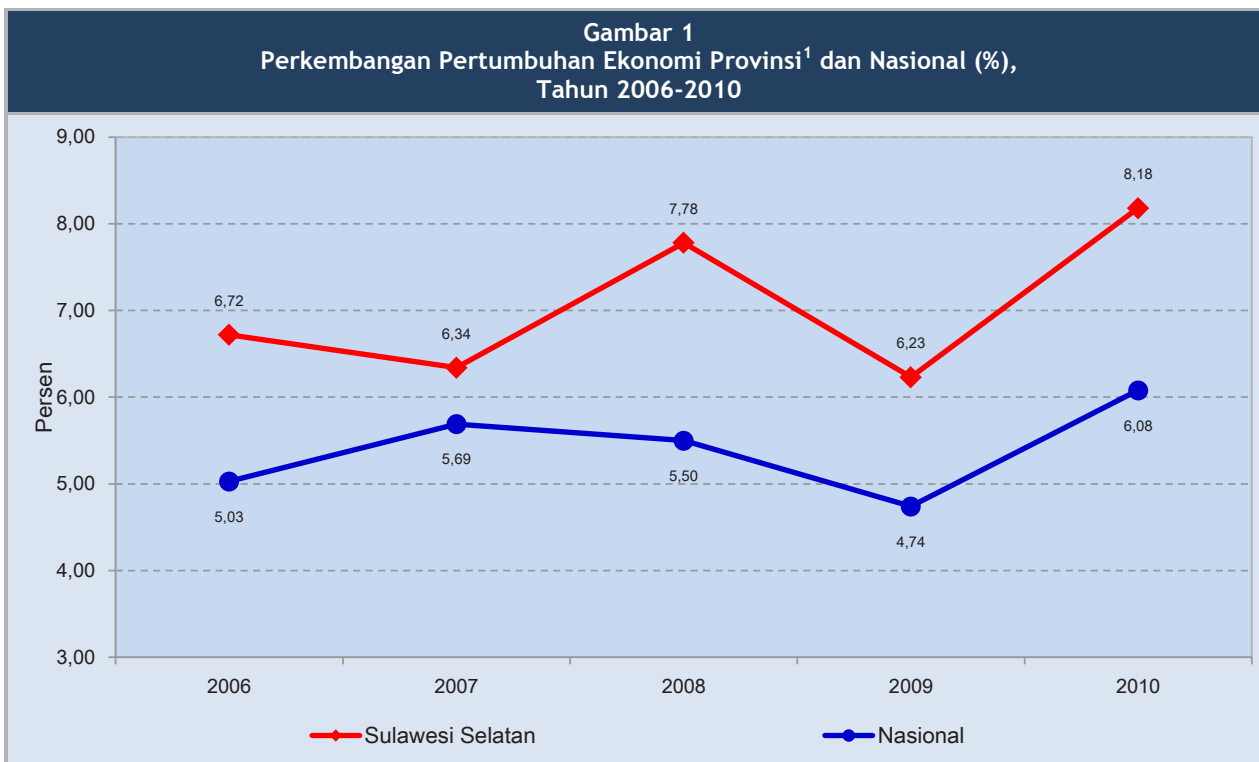


DAFTAR GAMBAR

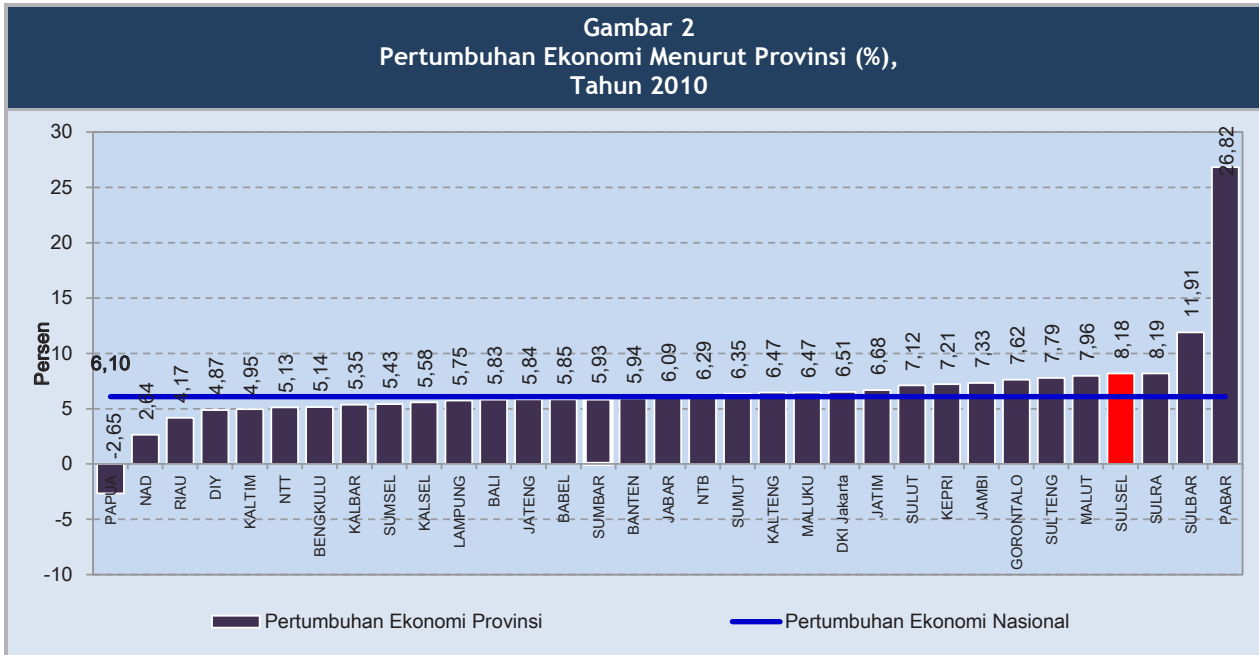
- Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Nasional (%), Tahun 2006-2010
- Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 3. Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan Buruh/Karyawan/Pegawai Sebulan Menurut Provinsi, Tahun 2010
- Gambar 4. Perkembangan Inflasi Tahunan (Year-on-Year) Provinsi Sulawesi Selatan (%), Tahun 2010-2011
- Gambar 5. Inflasi Tahunan (Year-on-Year) Menurut 66 Kota Besar di Masing-masing Provinsi (%), (Bulan Juli 2011)
- Gambar 6. Perkembangan Nilai Tukar Petani (Year-on-Year) Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2008-2011
- Gambar 7. Nilai Tukar Petani Menurut Provinsi (%), Bulan Juli 2011
- Gambar 8. Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 9. Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2010
- Gambar 10. Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010 dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun 2011 Menurut Kabupaten Kota
- Gambar 11. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2010
- Gambar 13. Persentase Balita Kekurangan Gizi Menurut Provinsi, Tahun 2010
- Gambar 14. Persentase Balita Kekurangan Gizi Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2007
- Gambar 15. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Provinsi (Jiwa), Tahun 2009
- Gambar 16. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), Tahun 2009
- Gambar 17. Persentase Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Medis Menurut Provinsi, Tahun 2009
- Gambar 18. Persentase Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Medis Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 19. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Tahun 2009
- Gambar 20. Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Provinsi (%), Tahun 2009
- Gambar 21. Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
- Gambar 22. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih Menurut Provinsi (%), Tahun 2009
- Gambar 23. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
- Gambar 24. Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Sanitasi Menurut Provinsi (%), Tahun 2009

- Gambar 25. Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Sanitasi Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
- Gambar 26. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, Tahun 2009
- Gambar 27. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 28. Konsumsi Normatif terhadap Produksi Bersih Sereal per Kapita Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 29. Peta Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 30. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun
- Gambar 31. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI)
- Gambar 32. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Menengah Pertama
- Gambar 33. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Angka Kematian Bayi
- Gambar 34. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi
- Gambar 35. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Air Bersih
- Gambar 36. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Sanitasi
- Gambar 37. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Listrik
- Gambar 38. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja
- Gambar 39. Komposisi BLM PNPM Mandiri Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2011
- Gambar 40. Perkembangan Rencana, Realisasi Penyaluran Kredit dan Jumlah Debitur KUR di Provinsi Sulawesi Selatan, 2010 - 2011
- Gambar 41. Perkembangan Rencana, Realisasi Penyaluran Kredit dan Jumlah Debitur KUR Nasional, 2010 - 2011
- Gambar 42. Jumlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Terserap Menurut Provinsi (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 43. Jumlah Kredit Terserap Per-Debitur Menurut Provinsi (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 44. Jumlah Kredit Terserap Per-Debitur Menurut Bank Penyalur (Juta Rupiah) (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 45. Komposisi Kredit yang Terserap Menurut Bank Penyalur Provinsi Sulawesi Selatan (Juta Rupiah) (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 46. Komposisi Alokasi Belanja Daerah Menurut Fungsi, Provinsi Sulawesi Selatan (Juta Rupiah), Tahun 2010
- Gambar 47. Komposisi Alokasi Belanja Daerah Menurut Fungsi dan Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

¹ Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 merupakan angka sementara dan tahun 2010 merupakan angka sangat sementara.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Tabel 1.

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2008 - 2009

LAPANGAN USAHA	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun Rupiah)		PDRB Atas Dasar Harga Konstan ADHK 2000 (Triliun Rupiah)		Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2000 (Persen)	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Pertanian	25,07	27,96	12,92	13,52	6,09	4,59
Pertambangan Dan Penggalian	6,20	5,50	4,03	3,85	-2,94	-4,51
Industri Pengolahan	11,06	12,51	6,24	6,47	8,71	3,64
Listrik, Gas & Air Bersih	0,84	0,95	0,45	0,49	12,50	8,75
Bangunan	4,25	5,39	2,33	2,66	19,89	14,10
Perdagangan, Hotel & Restoran	13,91	16,69	7,03	7,79	11,26	10,77
Pengangkutan & Komunikasi	6,97	7,95	3,65	4,02	12,54	10,20
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	5,20	6,24	2,88	3,20	10,37	11,21
Jasa - Jasa	11,63	16,70	5,00	5,31	5,75	6,10
Produk Domestik Regional Bruto	85,14	99,90	44,55	47,31	7,78	6,23

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Tabel 2.

Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2008-2010 (Jiwa)

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2009	2010	2010
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Pertanian	1.613.949	1.569.316	1.588.626	1.620.177	1.572.479
Industri Pengolahan	183.430	158.047	214.668	200.446	197.342
Bangunan	148.467	170.870	168.301	178.220	158.753
Perdagangan, Hotel & Restoran	578.961	605.818	636.714	621.764	603.655
Pengangkutan & Komunikasi	194.483	186.546	187.010	172.957	174.098
Jasa - Jasa	352.573	338.304	362.460	406.108	499.938
Lainnya*	64.248	66.464	64.477	76.851	66.100
Jumlah	3.136.111	3.095.365	3.222.256	3.276.523	3.272.365

*) Sektor Listrik/Gas/Air, Pertambangan dan Lembaga Keuangan

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

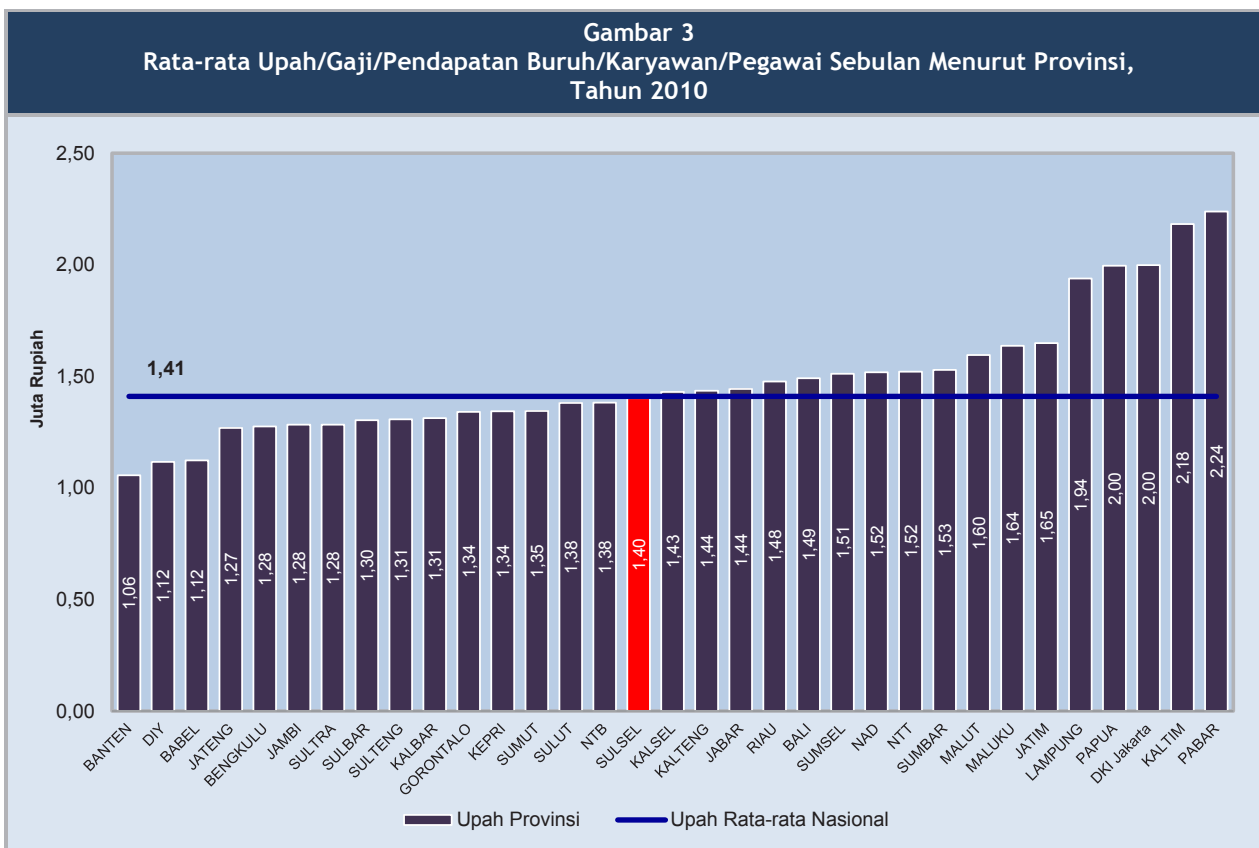
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Tabel 3.
Kontribusi Masing-masing Sektor Terhadap PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja, Tahun 2008-2009 (Persen)

LAPANGAN USAHA	Distribusi PDRB (ADHK 2000)		Distribusi Tenaga Kerja	
	2008	2009	2008	2009
Pertanian	29,01	28,57	51,46	49,30
Industri Pengolahan	14,01	13,67	5,85	6,66
Bangunan	5,23	5,62	4,73	5,22
Perdagangan. Hotel & Restoran	15,79	16,47	18,46	19,76
Pengangkutan & Komunikasi	8,20	8,50	6,20	5,80
Jasa - Jasa	6,47	6,77	11,24	11,25
Lainnya*	11,23	11,22	2,05	2,00

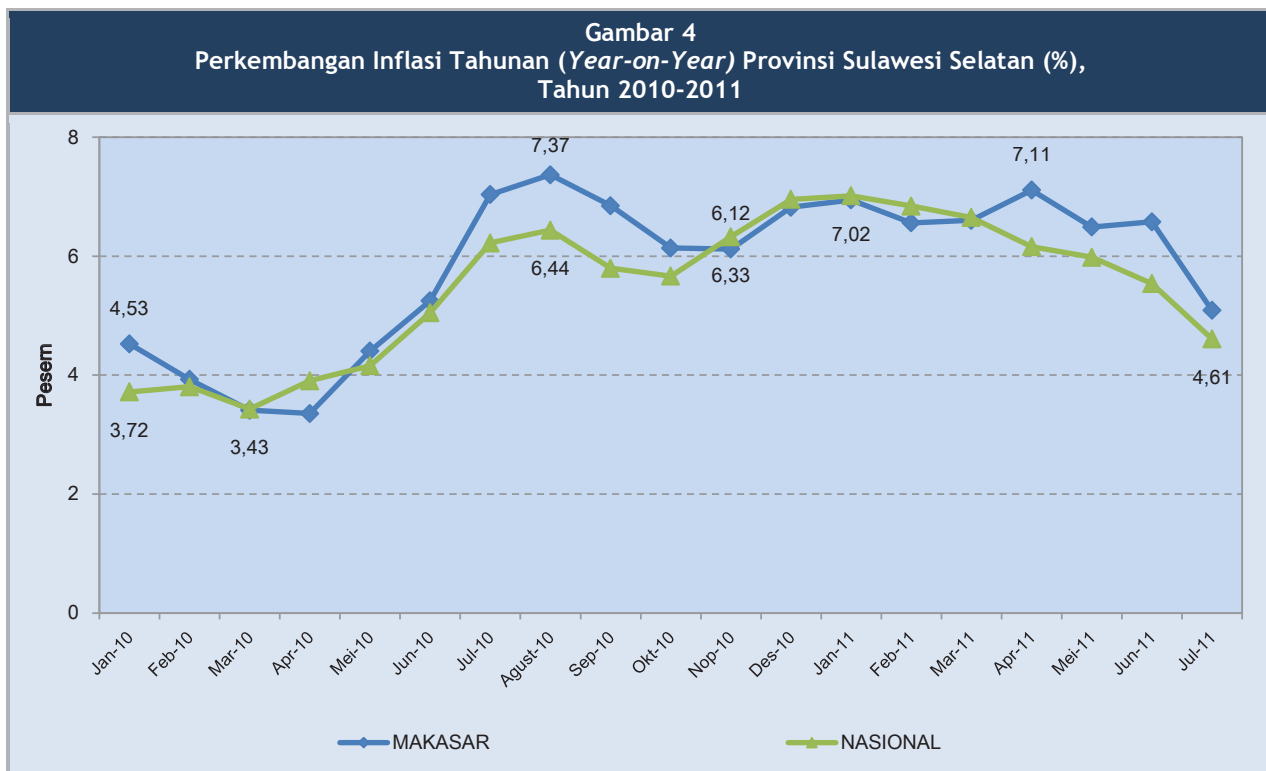
*) Sektor Listrik/Gas/Air, Pertambangan dan Lembaga Keuangan

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

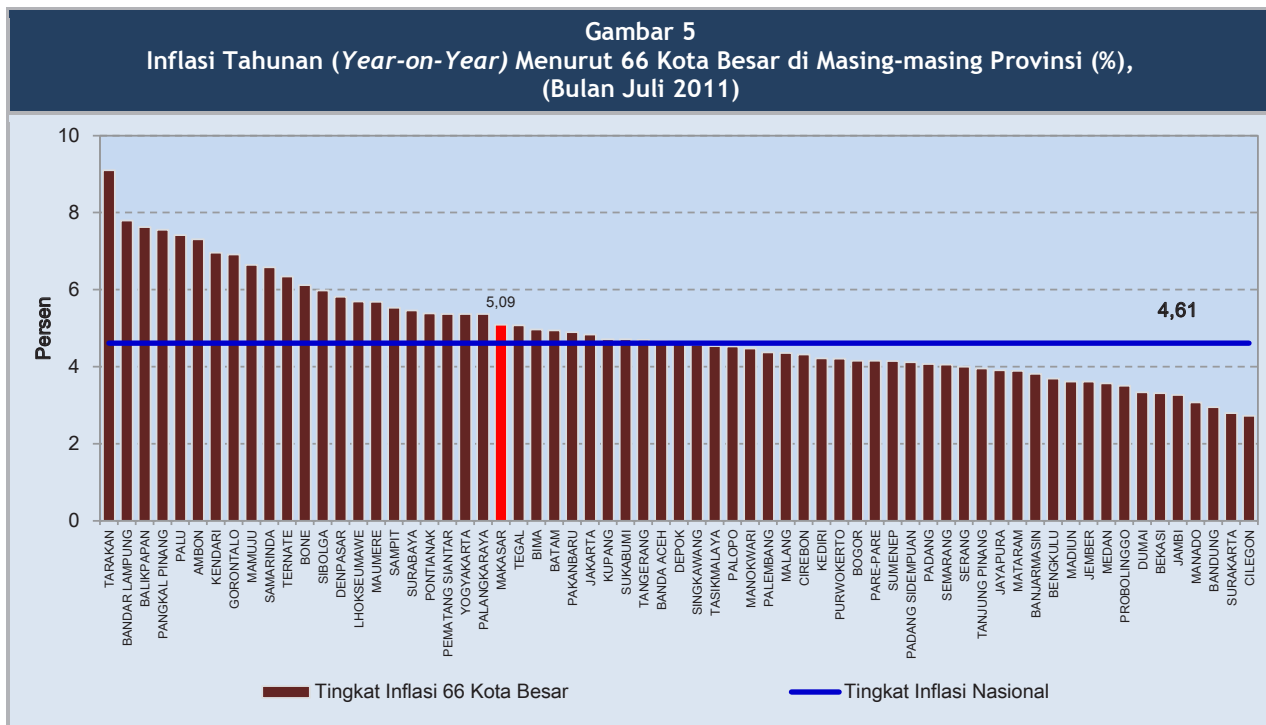


Sumber: Keadaan Pekerja di Indonesia, BPS 2011

INFLASI

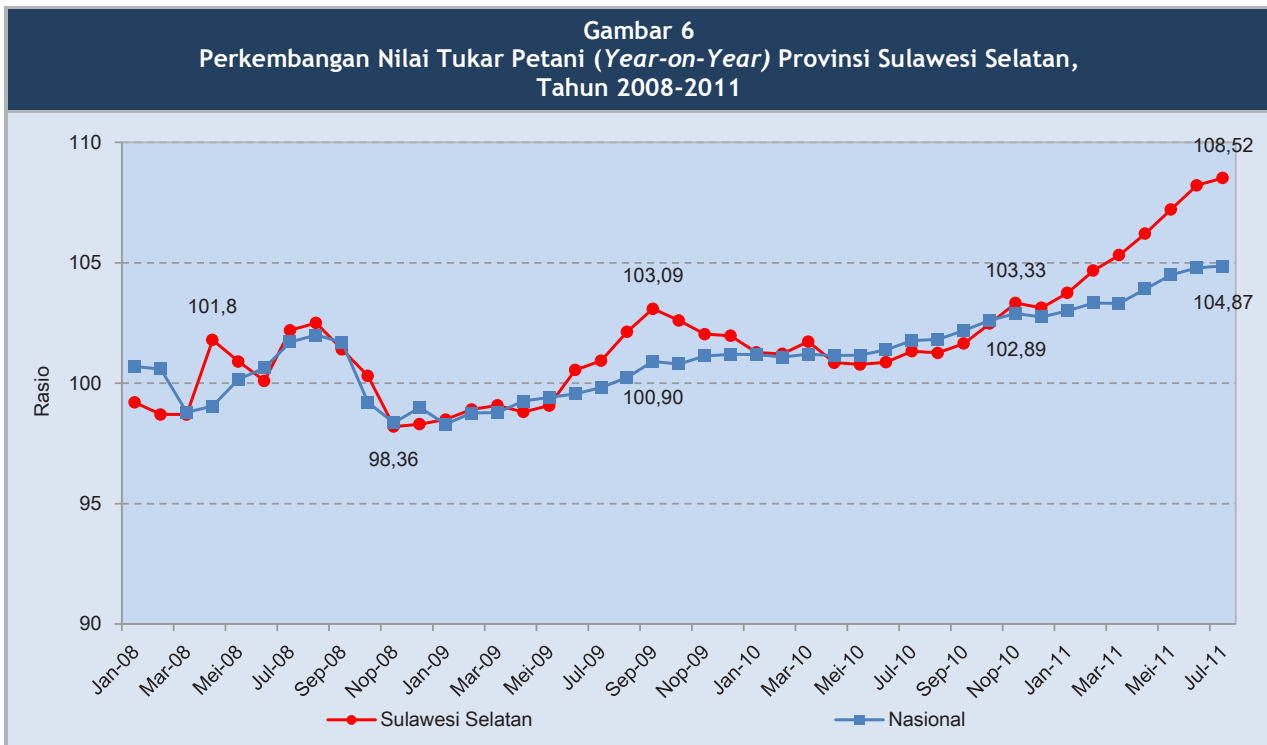


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

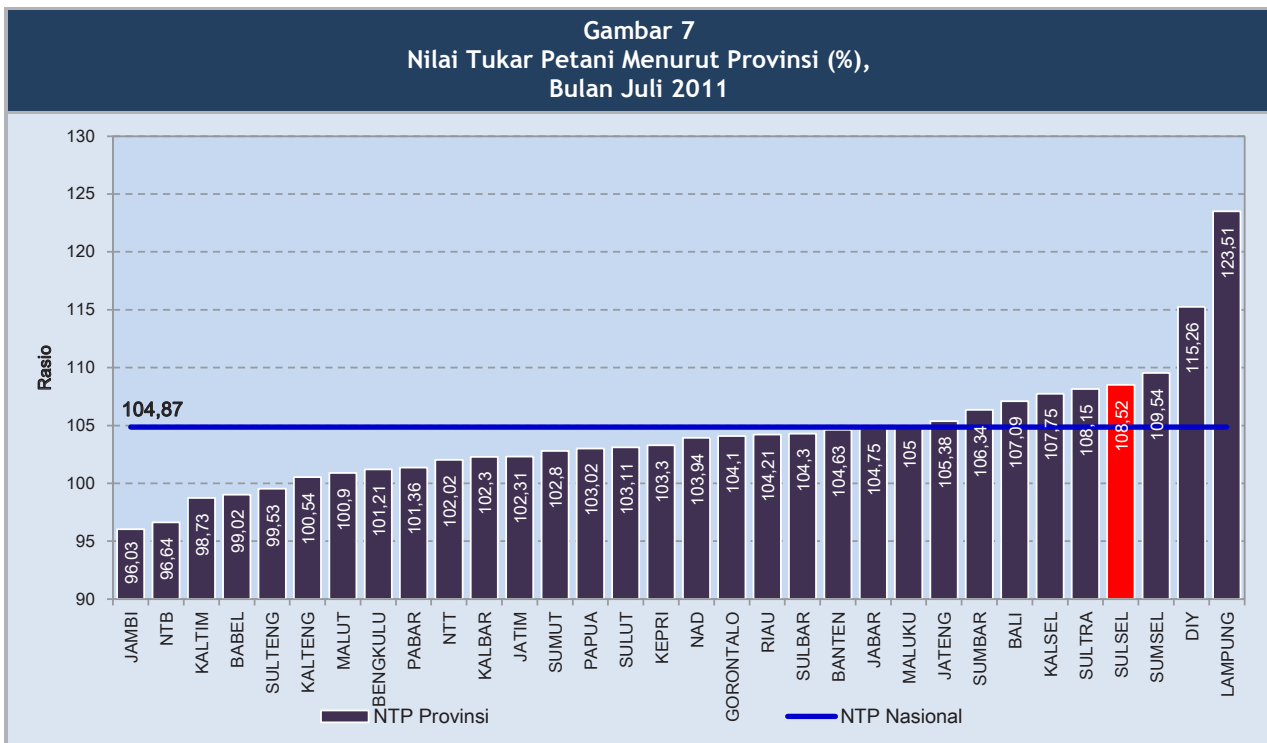


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

NILAI TUKAR PETANI

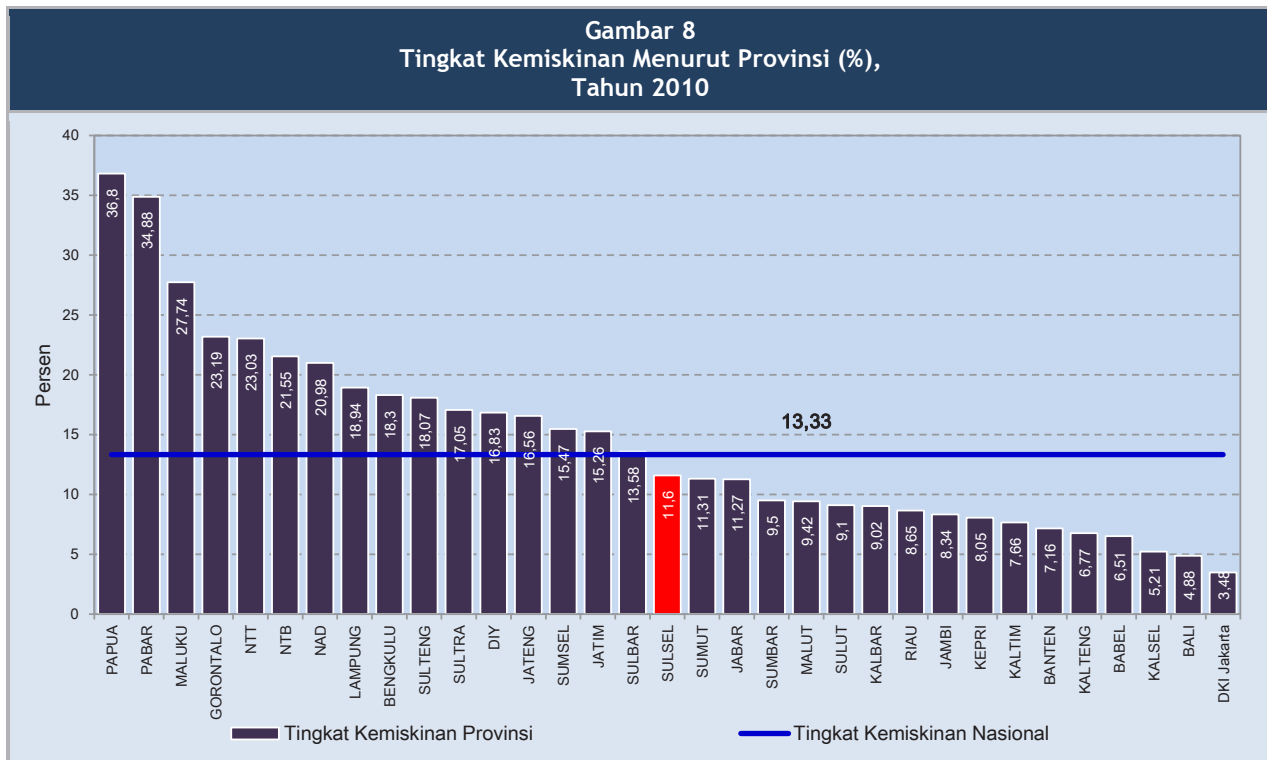


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

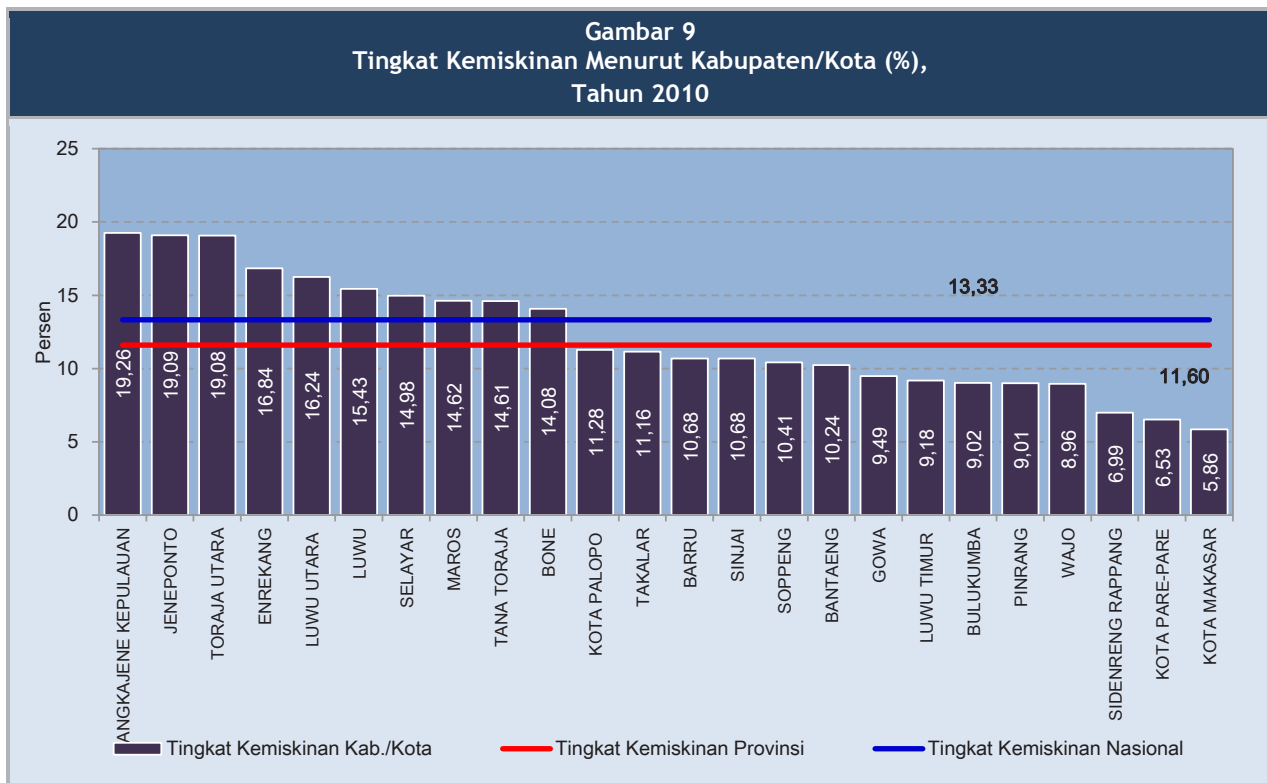


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

TINGKAT KEMISKINAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

INDIKATOR KEMISKINAN

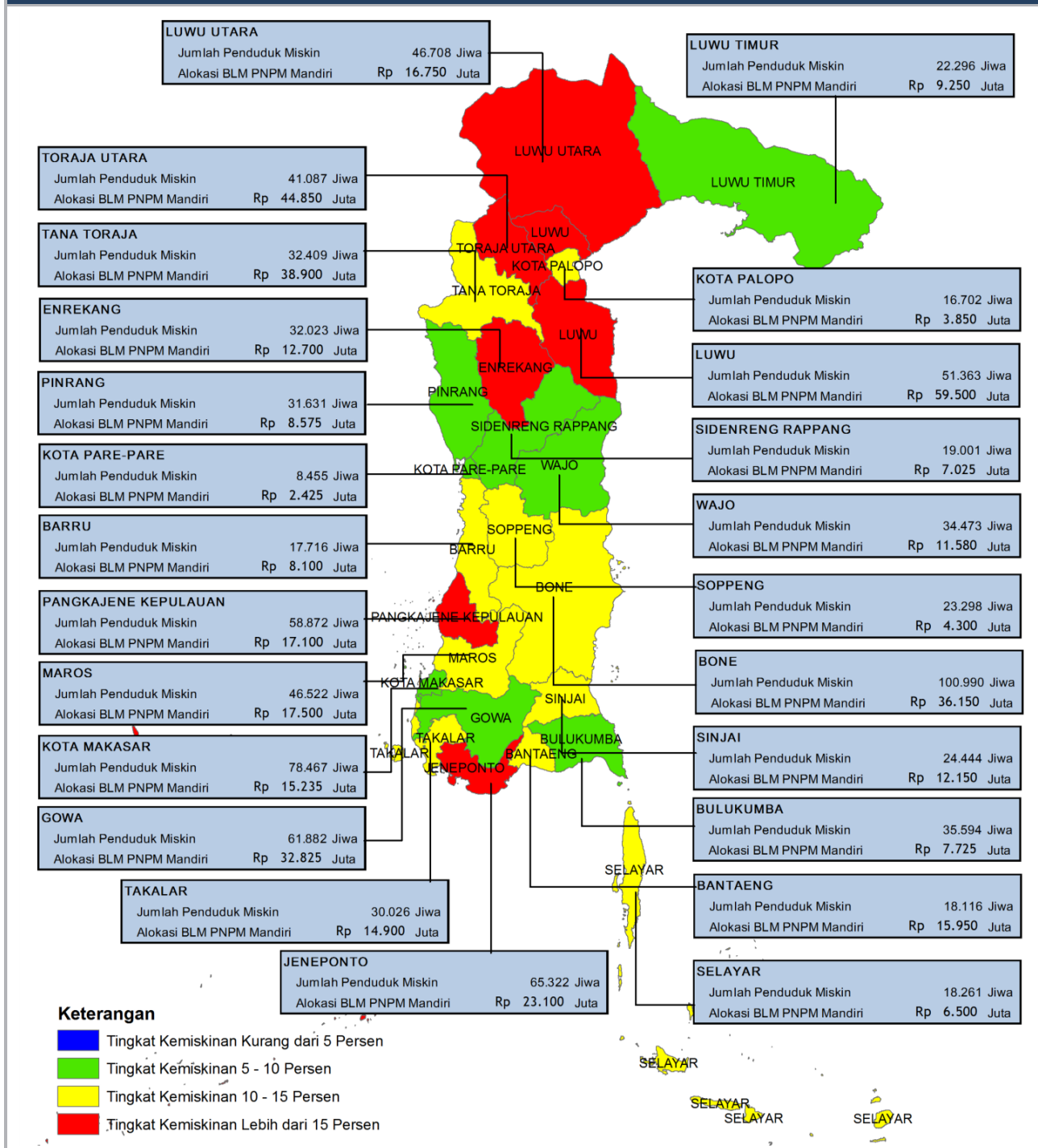
Tabel 4.
Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2010

Daerah	Garis Kemiskinan (Rp/Bulan)		Presentase Penduduk Miskin (%)		Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
SELAYAR	180 355	203 726	16,41	14,98	19 834	18 261
BULUKUMBA	177 859	200 907	10,50	9,02	41 122	35 594
BANTAENG	142 972	161 499	9,96	10,24	17 211	18 116
JENEPONTO	188 731	213 188	20,58	19,09	68 219	65 322
TAKALAR	179 994	203 319	11,06	11,16	28 325	30 026
GOWA	195 452	220 780	10,93	9,49	67 013	61 882
SINJAI	169 415	189 004	11,37	10,68	25 766	24 444
MAROS	212 544	237 119	16,35	14,62	49 777	46 522
PANGKAJENE KEPULAUAN	185 923	207 420	19,35	19,26	57 367	58 872
BARRU	194 138	216 585	11,43	10,68	18 476	17 716
BONE	167 601	189 320	15,19	14,08	107 271	100 990
SOPPING	170 178	180 352	9,95	10,41	22 784	23 298
WAJO	196 543	208 293	8,93	8,96	33 770	34 473
SIDENRENG RAPPANG	185 330	196 410	6,73	6,99	16 857	19 001
PINRANG	176 376	186 920	8,70	9,01	30 320	31 631
ENREKANG	190 151	204 861	18,10	16,84	34 239	32 023
LUWU	184 095	198 336	16,96	15,43	55 227	51 363
TANA TORAJA	172 445	185 785	16,14	14,61	75 240	32 409
LUWU UTARA	192 085	206 944	16,40	16,24	52 455	46 708
LUWU TIMUR	184 242	198 494	8,91	9,18	21 013	22 296
TORAJA UTARA		249 111		19,08		41 087
KOTA MAKASAR	209 582	233 815	5,52	5,86	69 667	78 467
KOTA PARE-PARE	188 525	199 796	6,52	6,53	7 685	8 455
KOTA PALOPO	185 464	199 811	11,85	11,28	17 260	16 702
SULAWESI SELATAN	153 715	163 089	12,31	11,6	936 898	915 660
INDONESIA	200 262	211 726	14,15	13,33	32.530.000	31.023.390

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan hasil Susenas Kor Juli 2010)

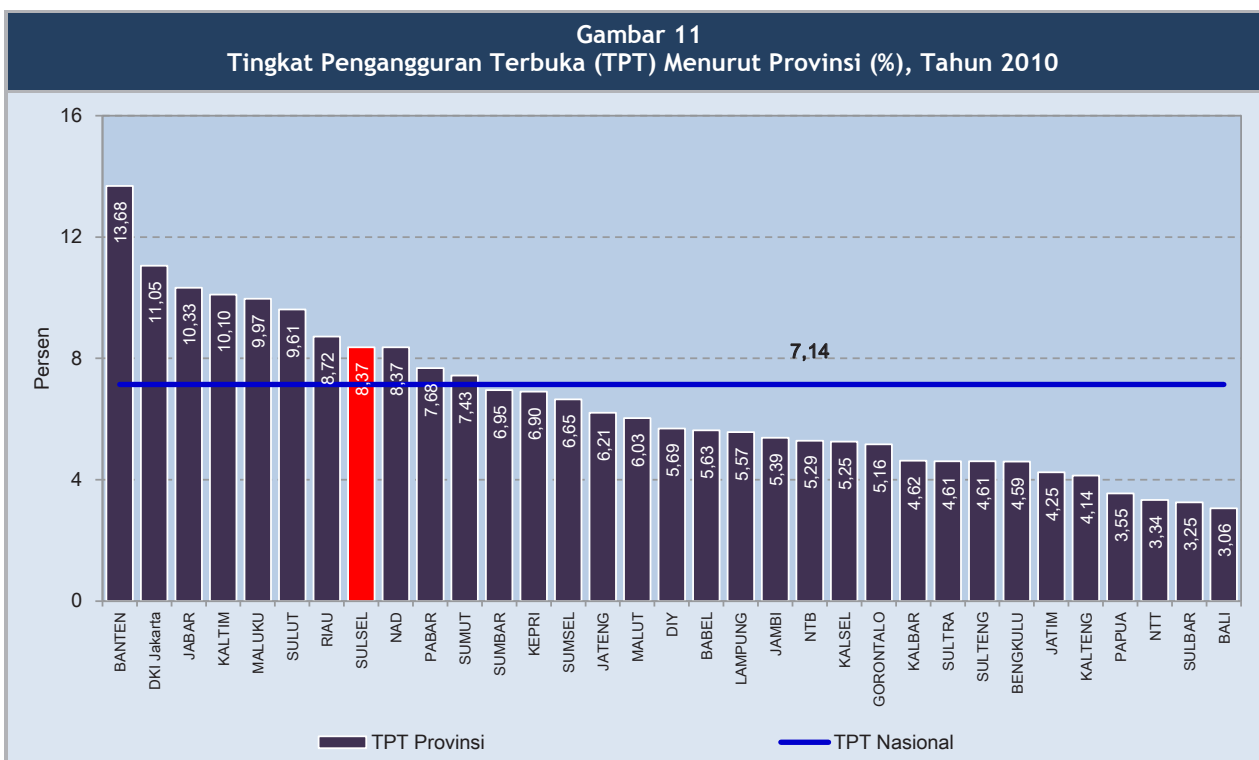
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Gambar 10
Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010,
Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun 2011 Menurut Kabupaten Kota

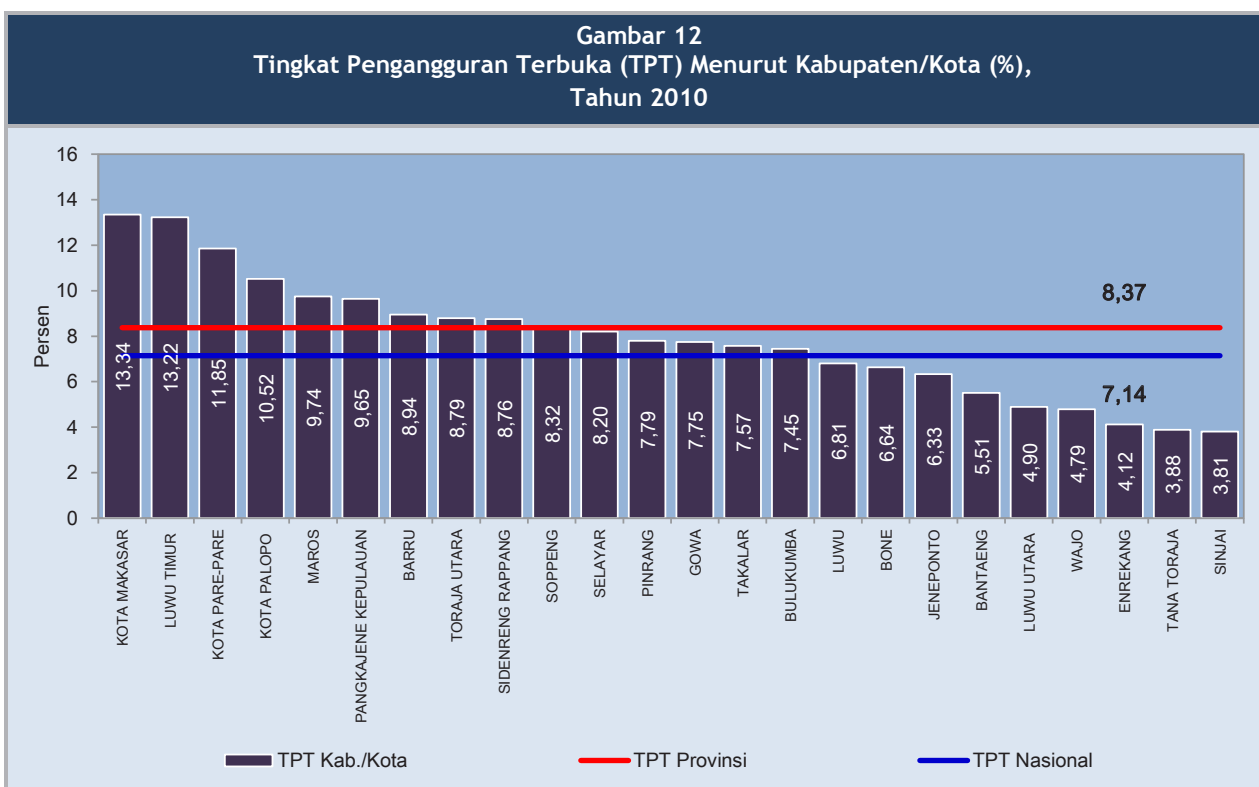


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011
 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011

TINGKAT PENGANGGURAN DAN KETENAGAKERJAAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)

TINGKAT PENGANGGURAN DAN KETENAGAKERJAAN

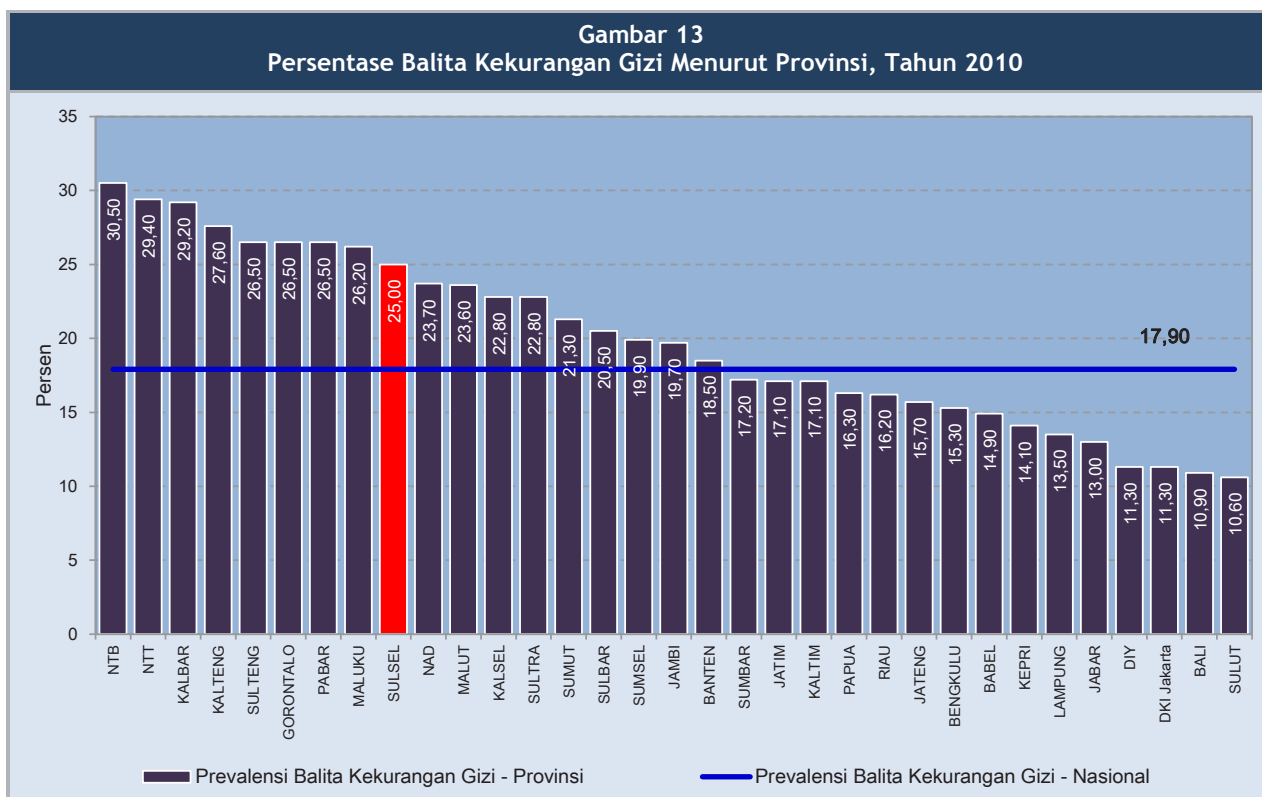
Tabel 5.
Indikator Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009 dan 2010

Daerah	Angka Partisipasi Angkatan Kerja		Pekerja yang Bekerja Selama Kurang dari 14 Jam Seminggu		Pekerja yang Bekerja Selama Kurang dari 35 Jam Seminggu		Pekerja di Sektor Informal	
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
SELAYAR	62,75	67,72	4,23	6,45	38,69	43,72	70,04	64,26
BULUKUMBA	67,83	66,45	11,48	12,08	44,68	54,54	74,63	74,42
BANTAENG	71,95	77,92	12,52	8,39	47,65	44,34	74,47	76,60
JENEPONTO	62,68	66,86	10,00	14,07	39,52	52,31	82,99	82,39
TAKALAR	59,54	59,75	5,93	5,52	27,12	31,49	67,23	55,83
GOWA	61,97	64,69	6,51	6,88	35,63	34,97	65,17	66,56
SINJAI	64,05	66,64	12,89	10,97	47,80	49,90	76,03	73,36
MAROS	57,56	64,09	7,67	8,35	35,60	34,25	59,62	59,52
PANGKAJENE KEPULAUAN	59,85	61,02	2,80	2,98	28,20	35,27	63,76	56,47
BARRU	51,85	56,95	4,04	5,06	34,83	35,73	62,38	60,41
BONE	63,38	64,67	11,66	8,65	44,41	46,01	71,68	75,78
SOPPENG	58,83	57,72	6,40	11,24	39,25	52,56	77,07	75,12
WAJO	64,01	63,70	5,93	4,13	31,90	31,61	69,54	66,53
SIDENRENG RAPPANG	55,03	57,80	5,40	5,56	32,76	37,35	74,74	69,10
PINRANG	60,17	58,86	9,46	9,97	42,19	44,11	69,12	63,35
ENREKANG	73,37	74,31	12,06	8,52	39,75	48,26	84,62	81,53
LUWU	58,90	64,23	9,78	16,50	48,15	57,08	78,64	73,80
TANA TORAJA	69,48	68,62	2,48	5,99	53,54	63,16	87,65	84,05
LUWU UTARA	65,42	69,11	6,92	11,13	43,18	53,25	80,05	76,27
LUWU TIMUR	67,99	75,85	6,83	9,69	34,22	41,70	69,67	66,24
TORAJA UTARA		69,54		4,56		53,47		83,94
KOTA MAKASAR	60,79	60,70	2,12	1,88	13,96	10,87	32,49	27,88
KOTA PARE-PARE	62,91	65,23	3,13	2,57	17,80	18,26	41,25	46,35
KOTA PALOPO	59,34	60,18	3,19	5,17	19,59	23,87	41,49	39,78
SILAWESI SELATAN	62,48	64,14	6,88	7,41	35,31	38,50	65,61	63,31
NASIONAL	67,23	67,72	4,29	4,11	30,10	30,75	61,56	58,96

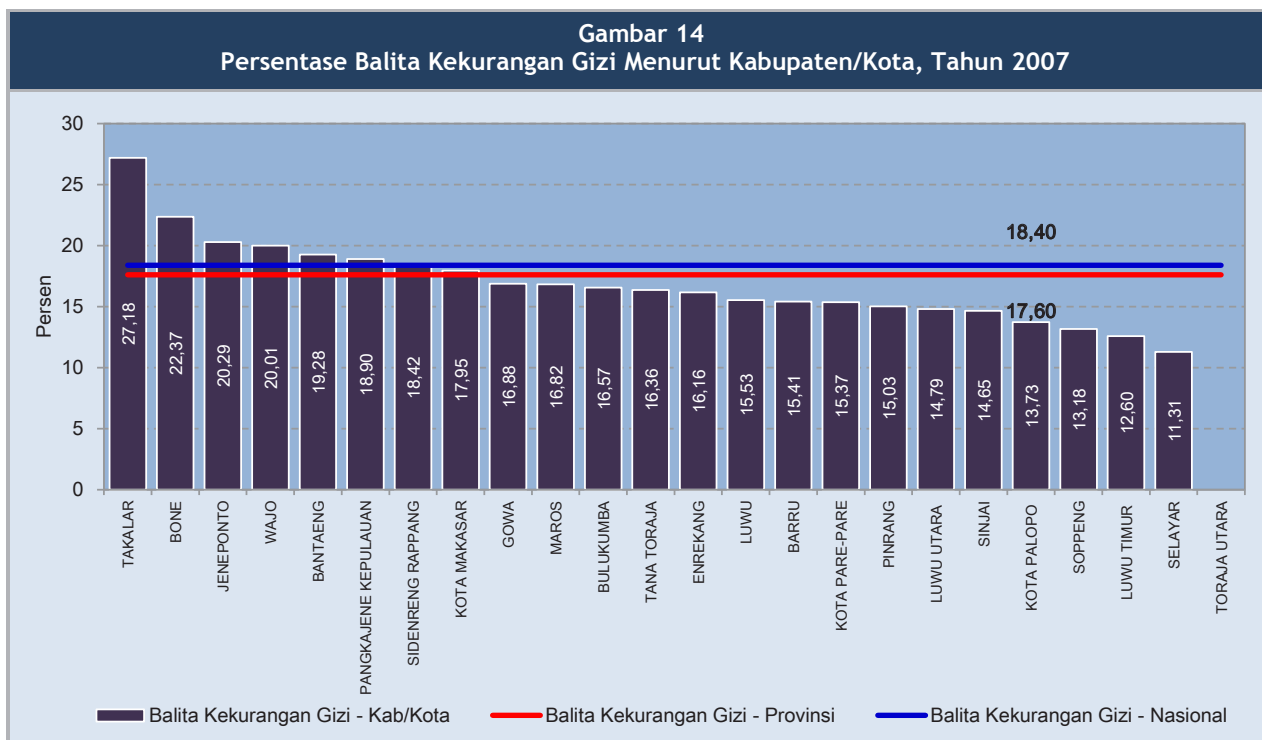
Keterangan: Daerah Pemekaran, Data Belum Tersedia.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)

BIDANG KESEHATAN

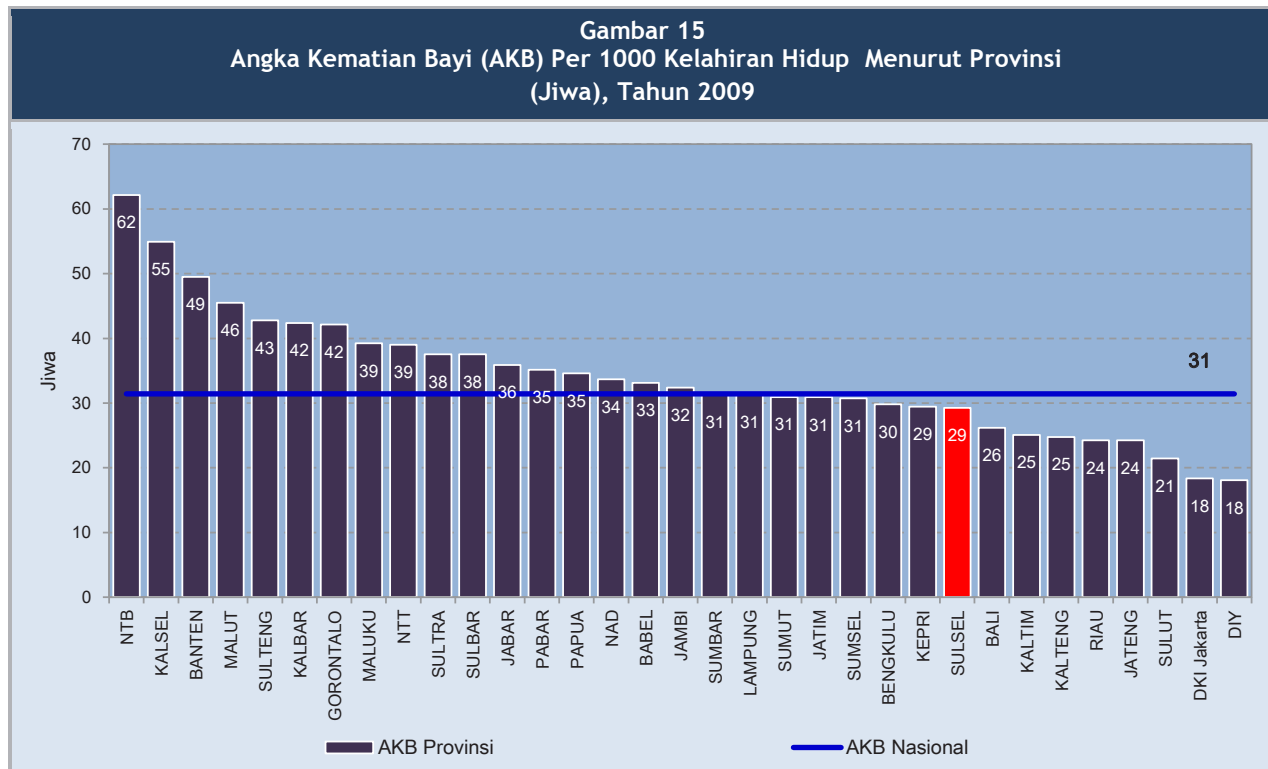


Sumber: Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 2010

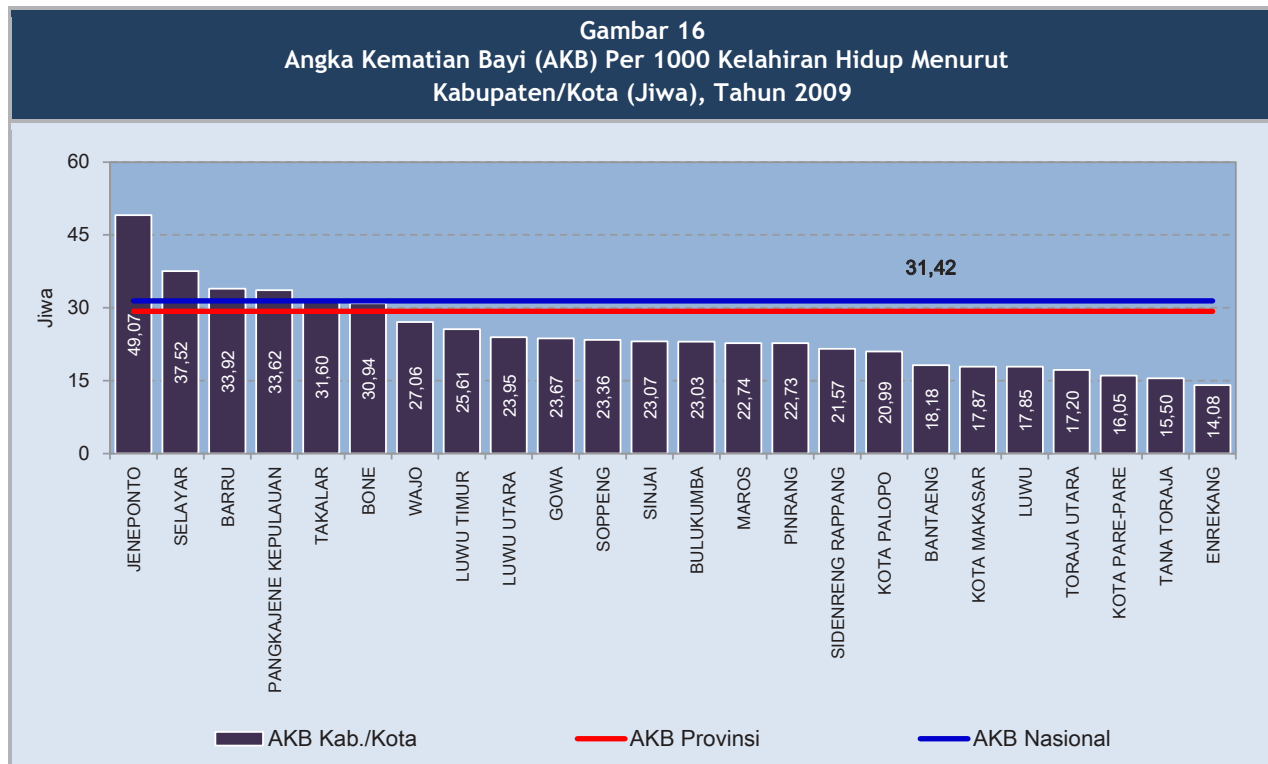


Sumber: Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 2007

BIDANG KESEHATAN

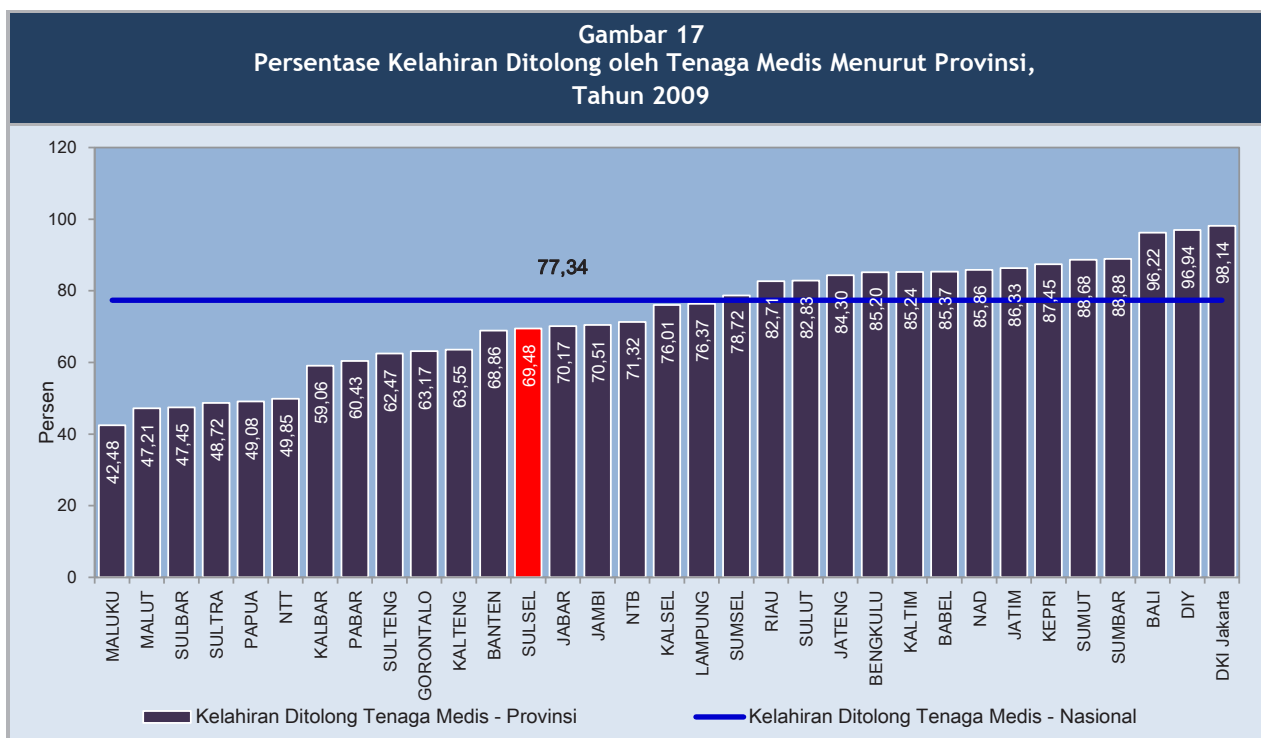


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

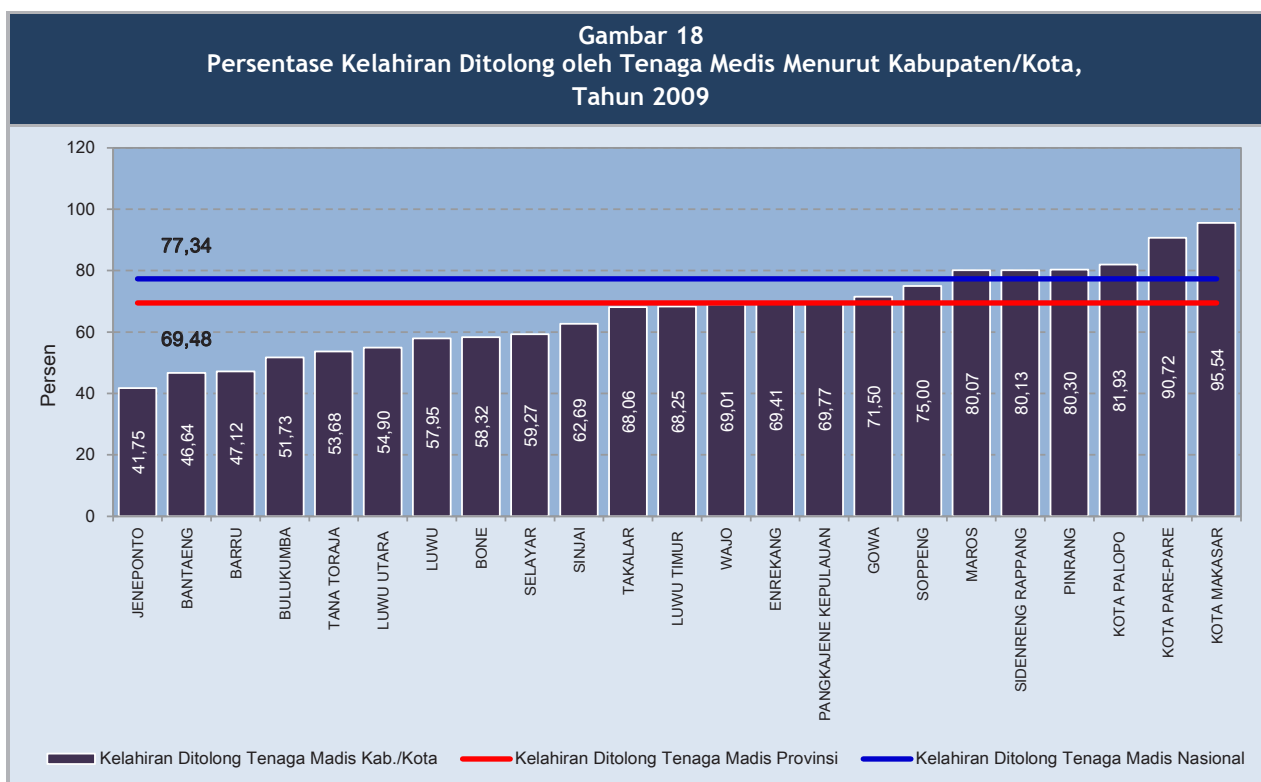


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

BIDANG KESEHATAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

BIDANG KESEHATAN

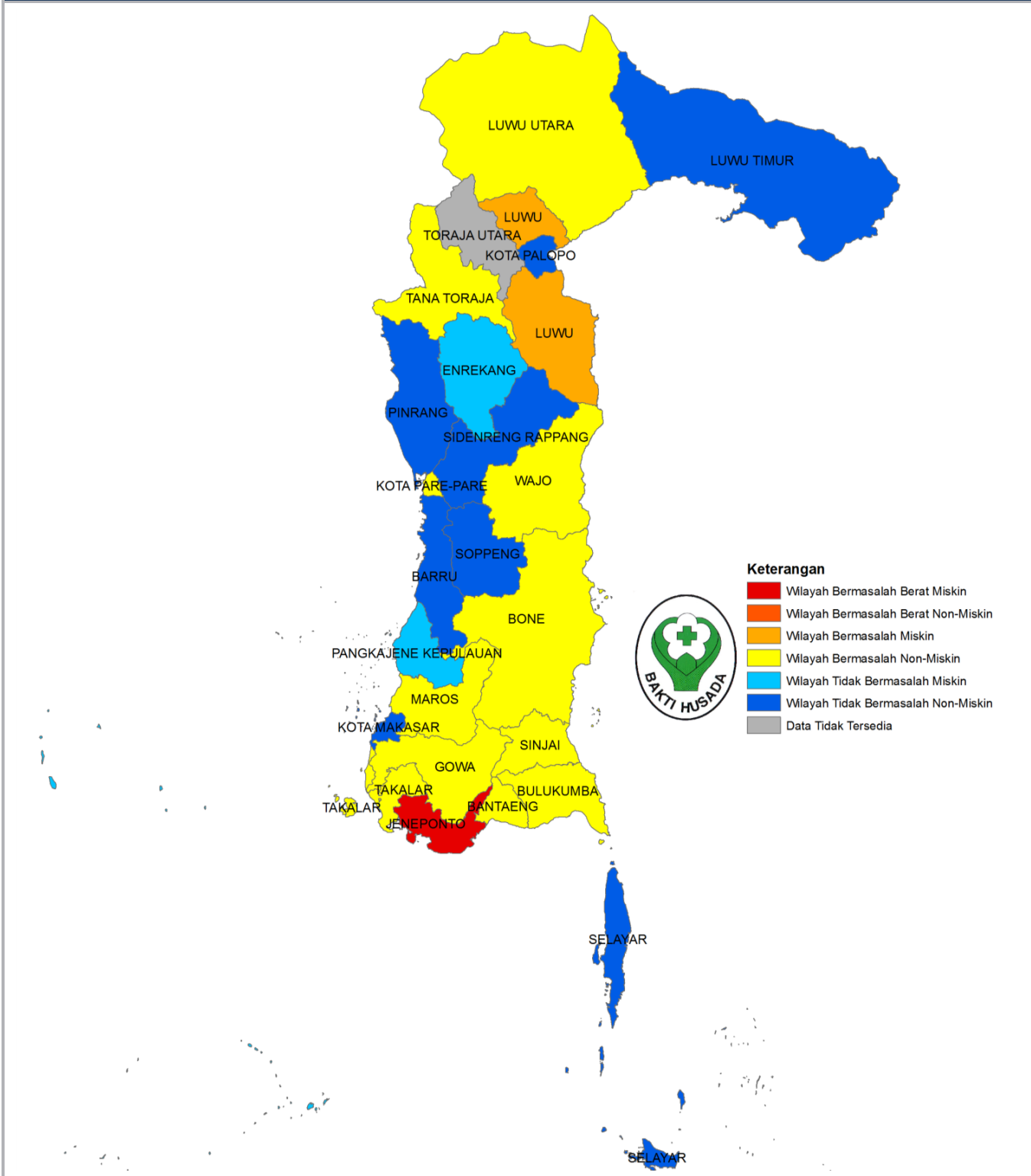
Tabel 6.
Indikator Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Daerah	Penduduk dengan keluhan kesehatan	Angka Morbiditas	Rata-rata Lama Sakit	Penduduk yg Melakukan Pengobatan Sendiri
	(%)	(%)	(%)	(%)
SELAYAR	28,27	17,04	6,08	77,18
BULUKUMBA	28,65	14,99	6,19	77,13
BANTAENG	44,85	22,68	5,28	65,12
JENEPONTO	35,41	18,97	6,26	70,91
TAKALAR	33,94	22,28	5,92	66,59
GOWA	30,02	19,39	5,31	61,52
SINJAI	27,20	13,74	5,80	77,31
MAROS	30,07	20,25	6,00	70,21
PANGKAJENE KEPULAUAN	21,71	11,56	6,24	67,94
BARRU	25,02	15,23	6,29	60,69
BONE	27,89	15,64	7,62	76,31
SOPPENG	25,44	11,22	7,33	64,73
WAJO	35,94	18,96	6,49	75,04
SIDENRENG RAPPANG	33,56	19,56	5,58	65,62
PINRANG	35,03	16,05	5,79	71,49
ENREKANG	30,80	19,26	6,11	65,28
LUWU	29,48	20,95	5,49	79,54
TANA TORAJA	39,96	27,14	5,29	59,54
LUWU UTARA	33,14	18,68	6,28	60,45
LUWU TIMUR	45,23	24,38	4,75	60,94
KOTA MAKASAR	30,43	22,55	4,97	63,30
KOTA PARE-PARE	24,82	10,62	6,08	64,83
KOTA PALOPO	36,70	20,95	5,04	73,78
SULAWESI SELATAN	31,69	19,08	5,76	67,79
INDONESIA	33,68	18,63	5,51	68,41

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT

Gambar 19
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Tahun 2009



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2010

INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT

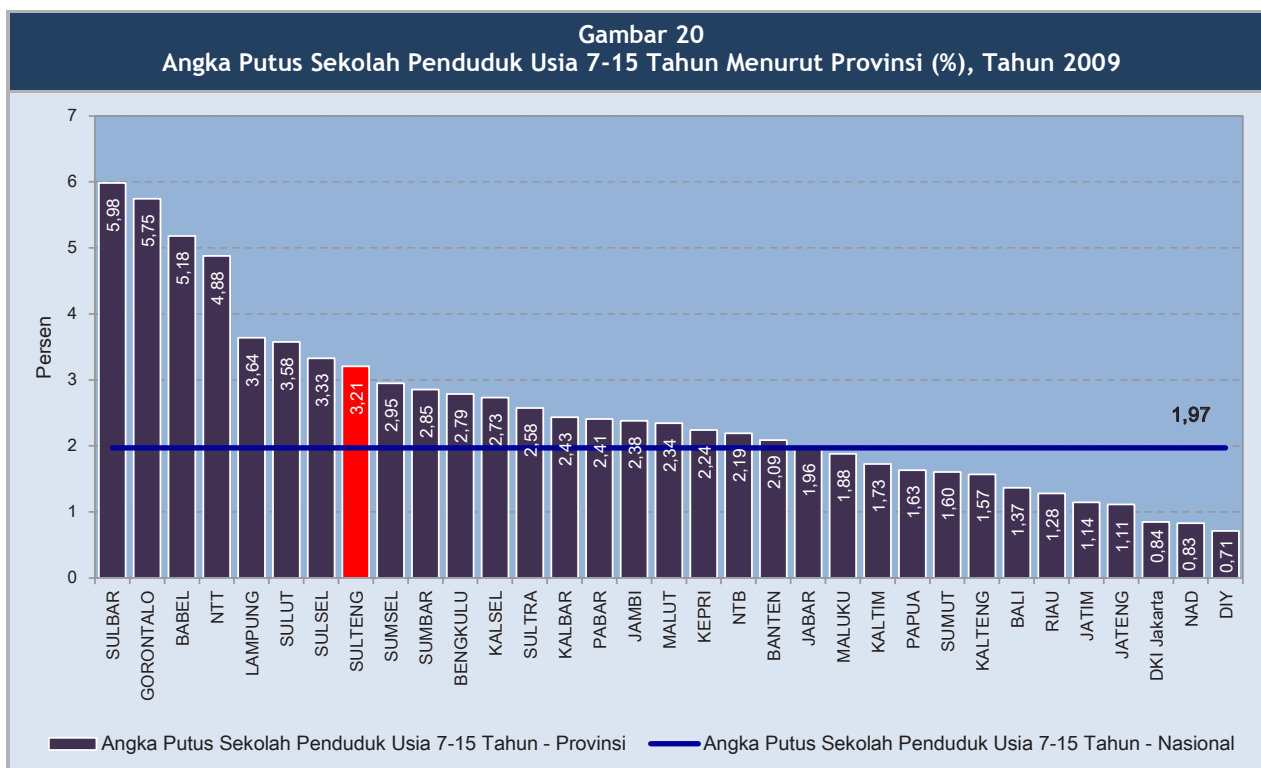
Tabel 7.
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)² Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Kabupaten/Kota	Kategori Wilayah	IPKM		Keterangan
		Rangking	Nilai	
SELAYAR	KaF	161	0,54	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
BULUKUMBA	KaD	311	0,45	Kabupaten Bermasalah Non Miskin
BANTAENG	KaD	318	0,45	Kabupaten Bermasalah Non Miskin
JENEPONTO	KaA	424	0,35	Kabupaten Bermasalah Berat Miskin
TAKALAR	KaD	269	0,48	Kabupaten Bermasalah Non Miskin
GOWA	KaD	290	0,47	Kabupaten Bermasalah Non Miskin
SINJAI	KaD	331	0,44	Kabupaten Bermasalah Non Miskin
MAROS	KaD	258	0,48	Kabupaten Bermasalah Non Miskin
PANGKAJENE KEPULAUAN	KaE	180	0,53	Kabupaten Tidak Bermasalah Miskin
BARRU	KaF	210	0,52	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
BONE	KaD	355	0,43	Kabupaten Bermasalah Non Miskin
SOPPENG	KaF	36	0,64	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
WAJO	KaD	288	0,47	Kabupaten Bermasalah Non Miskin
SIDENRENG RAPPANG	KaF	81	0,60	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
PINRANG	KaF	121	0,57	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
ENREKANG	KaE	111	0,58	Kabupaten Tidak Bermasalah Miskin
LUWU	KaC	299	0,46	Kabupaten Bermasalah Miskin
TANA TORAJA	KaD	379	0,41	Kabupaten Bermasalah Non Miskin
LUWU UTARA	KaD	272	0,48	Kabupaten Bermasalah Non Miskin
LUWU TIMUR	KaF	184	0,53	Kabupaten Tidak Bermasalah Non Miskin
KOTA MAKASSAR	KoF	27	0,65	Kota Tidak Bermasalah Non Miskin
KOTA PARE-PARE	KoD	112	0,58	Kota Bermasalah Non Miskin
KOTA PALOPO	KoE	26	0,65	Kota Tidak Bermasalah Non Miskin

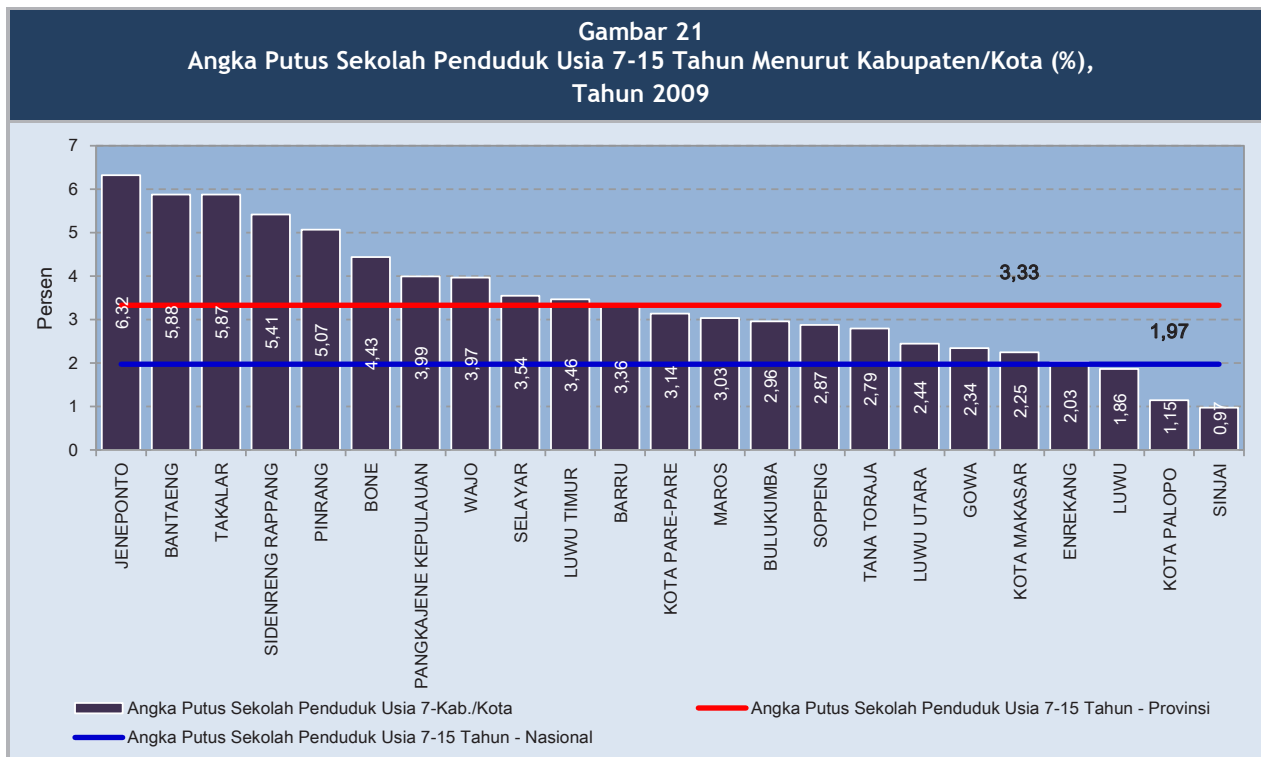
Sumber: Kementerian Kesehatan, 2010

² IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) adalah indikator komposit yang dirumuskan dari 24 indikator kesehatan dan dirumuskan dari data kesehatan berbasis komunitas yaitu: Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar); Susenas (Survei Ekonomi Nasional); dan Survei Podes (Potensi Desa). IPKM digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan pada bidang kesehatan dan mendukung efektivitas intervensi pada bidang kesehatan.

BIDANG PENDIDIKAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

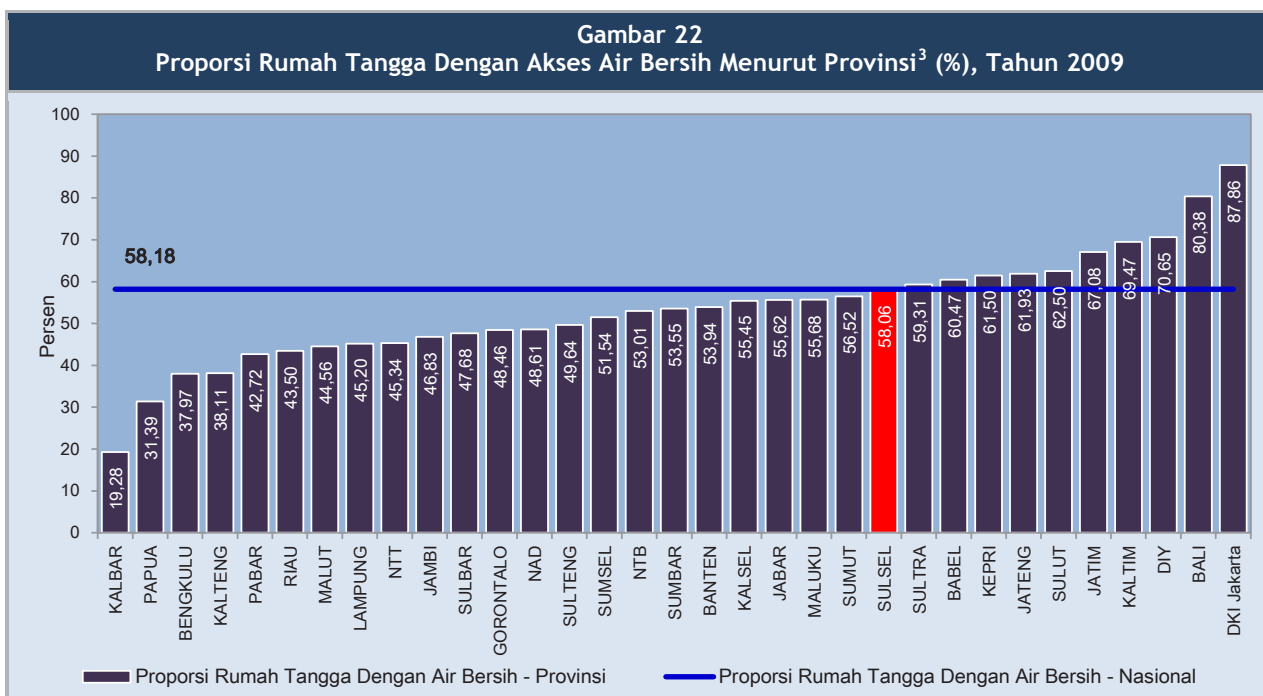
BIDANG PENDIDIKAN

Tabel 8.
Indikator Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

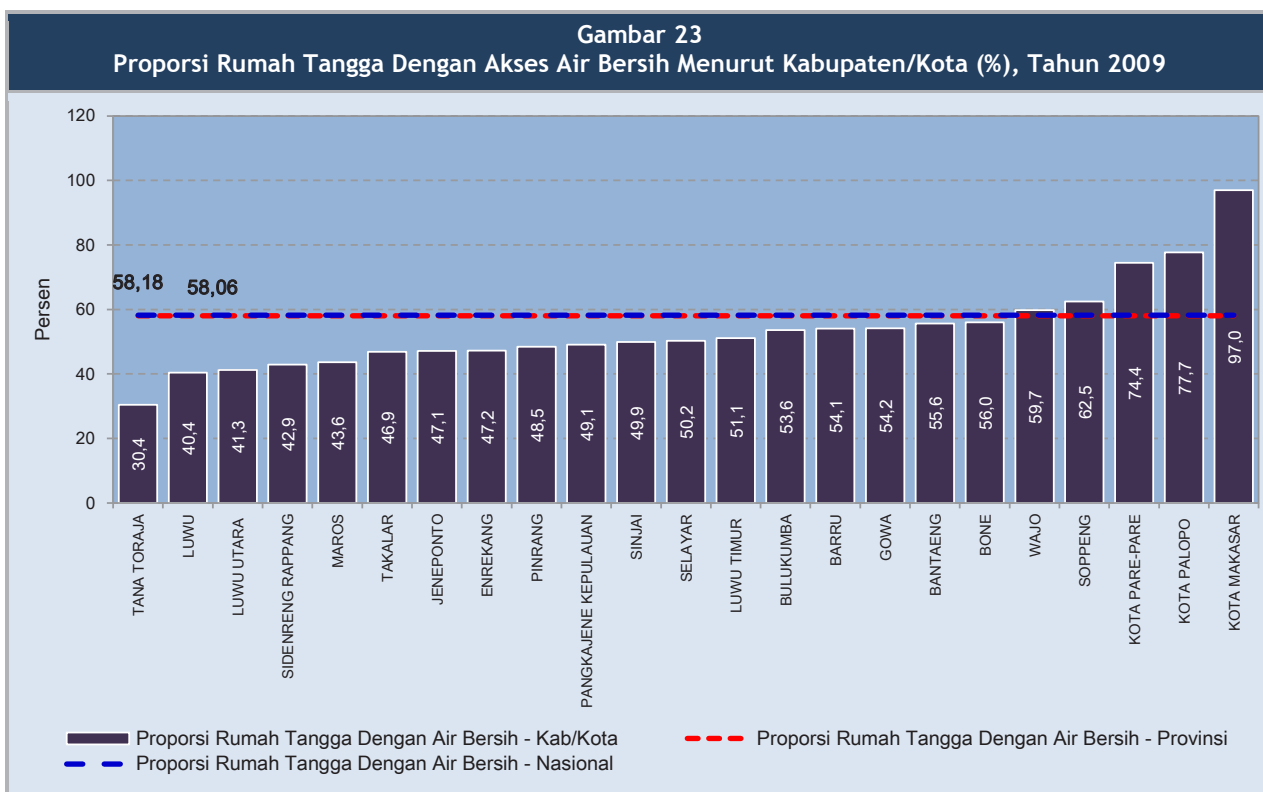
Daerah	Angka Partisipasi Pendidikan					
	Sekolah Dasar (SD/MI)		Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)		Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK)	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM
SELAYAR	113,66	95,77	80,91	71,57	60,14	44,88
BULUKUMBA	105,21	94,29	81,80	63,22	55,29	40,68
BANTAENG	105,46	90,83	65,25	54,09	48,14	30,15
JENEPONTO	110,34	91,17	64,22	54,52	54,26	30,92
TAKALAR	108,31	90,14	73,87	57,41	52,03	34,31
GOWA	108,75	92,79	72,26	58,42	68,84	40,96
SINJAI	110,14	92,02	91,11	70,11	69,88	53,49
MAROS	106,28	92,90	77,97	63,53	51,75	40,31
PANGKAJENE KEPULAUAN	102,83	91,24	66,64	55,27	40,30	33,25
BARRU	106,73	87,97	80,82	65,24	58,26	46,78
BONE	107,48	93,36	70,45	54,74	53,23	34,73
SOPPENG	105,63	94,78	82,22	69,13	61,75	46,55
WAJO	108,93	93,94	64,00	52,72	41,89	30,51
SIDENRENG RAPPANG	105,31	92,56	74,02	61,65	65,10	48,88
PINRANG	108,11	93,28	79,00	63,58	46,83	28,56
ENREKANG	111,28	94,77	93,25	73,36	74,42	51,23
LUWU	109,00	92,70	87,76	71,68	48,81	34,93
TANA TORAJA	110,54	95,56	81,89	71,29	62,48	49,98
LUWU UTARA	97,54	83,21	98,79	61,61	80,06	52,65
LUWU TIMUR	97,69	81,55	101,10	63,28	81,94	61,76
KOTA MAKASAR	110,92	94,69	66,34	60,90	80,61	46,06
KOTA PARE-PARE	112,69	92,74	68,93	58,78	79,12	52,72
KOTA PALOPO	101,84	84,37	95,53	64,20	88,05	56,99
SULAWESI SELATAN	107,54	92,27	76,54	61,74	62,78	42,03
INDONESIA	110,42	94,37	81,25	67,43	62,55	45,11

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

AKSES TERHADAP AIR BERSIH



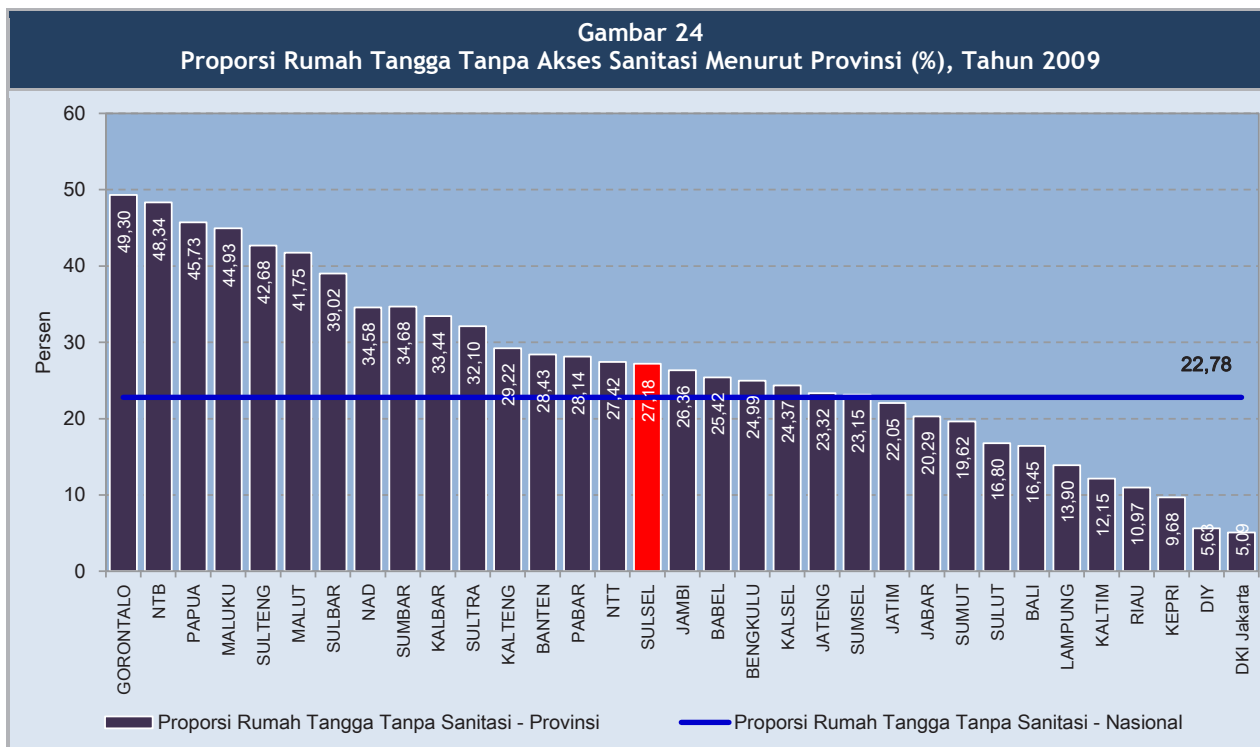
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



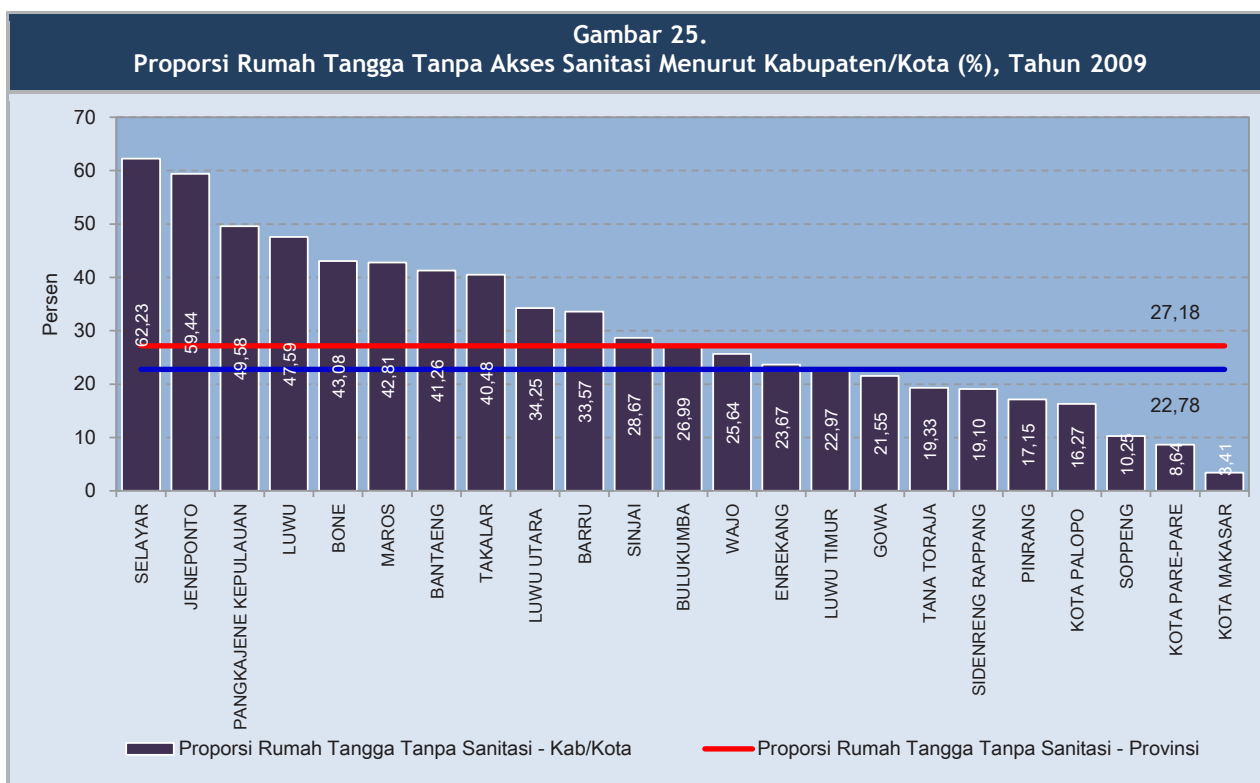
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

³ Akses terhadap air bersih dengan kontrol jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat

AKSES TERHADAP SANITASI

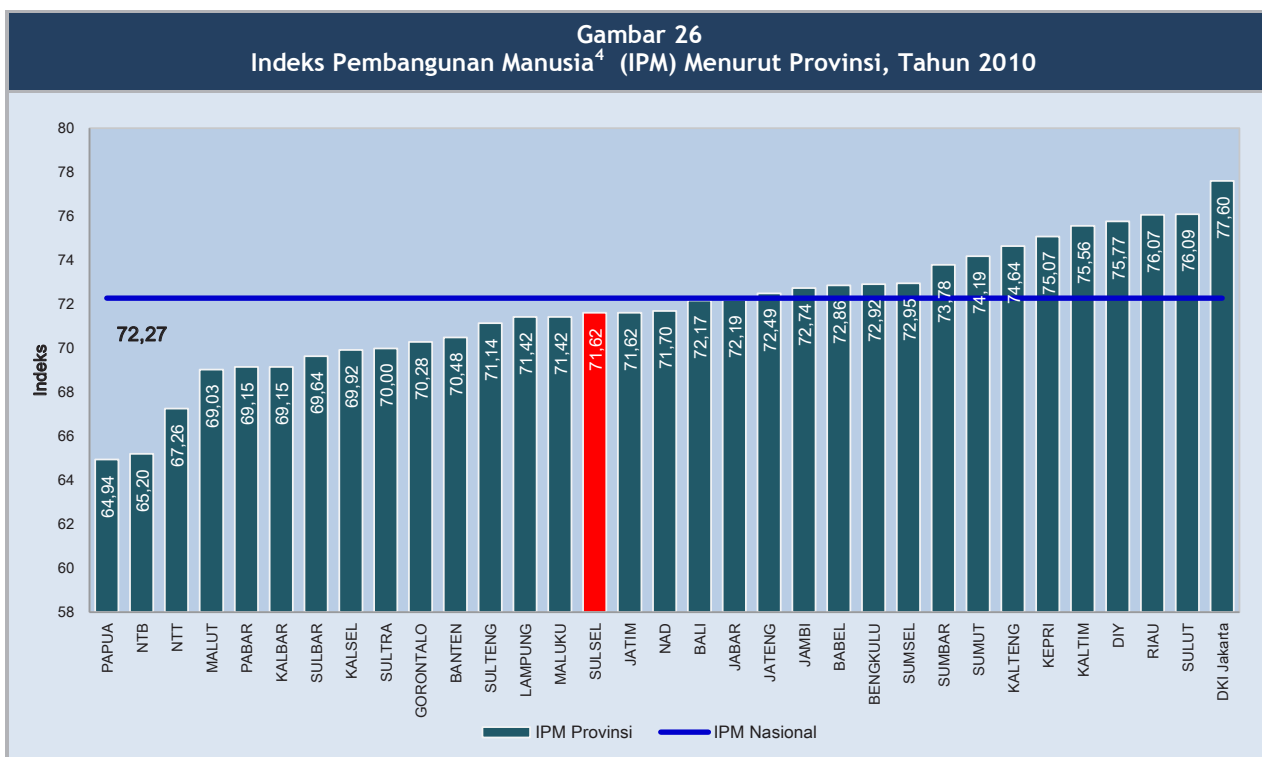


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

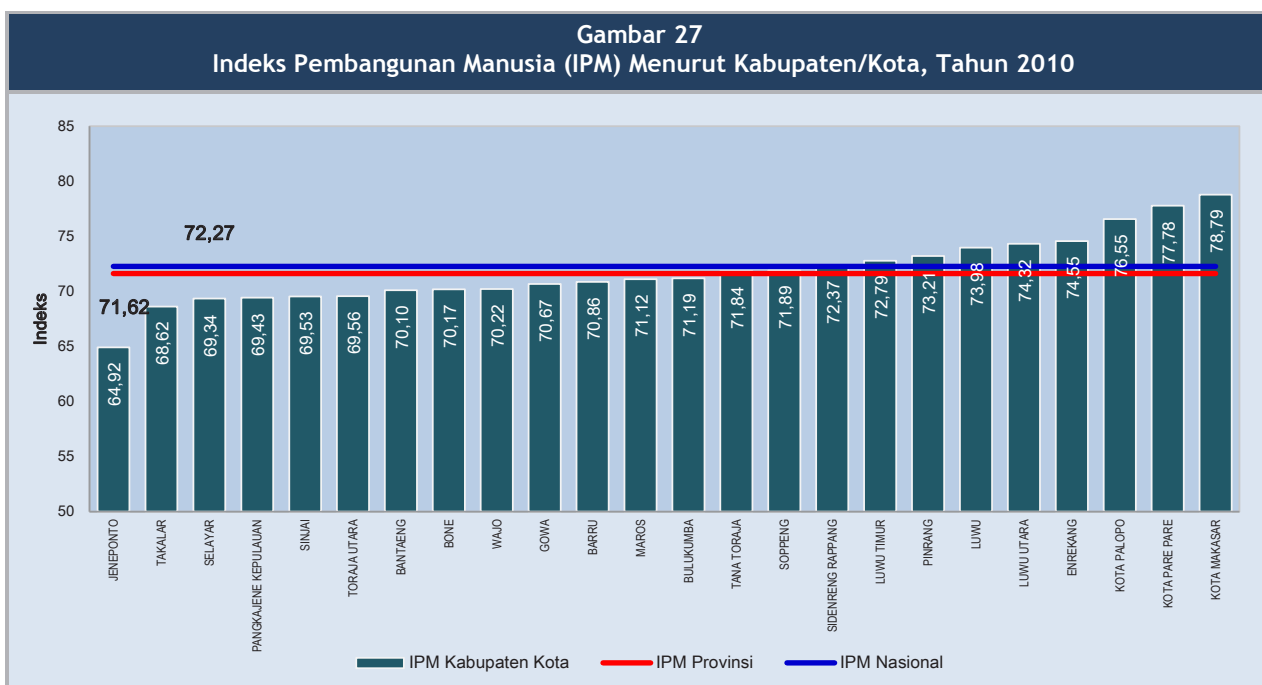


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

⁴ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran kesejahteraan dengan membandingkan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. Ukuran kesejahteraan tersebut diperkenalkan dan diterbitkan oleh PBB dalam Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report) sejak tahun 1990.

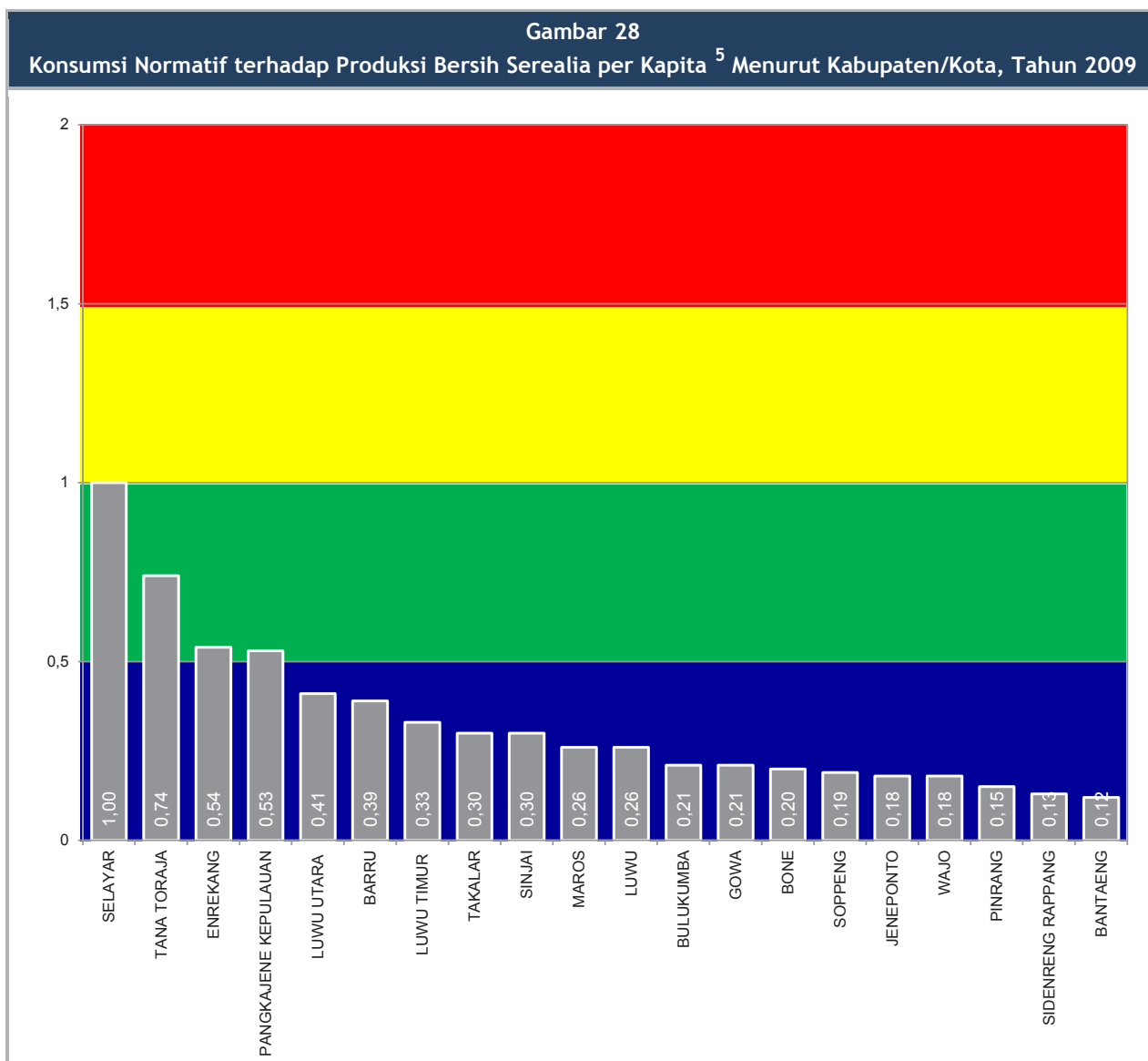
KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Tabel 9.
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota,
Tahun 2009 dan 2010

Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran Per Kapita		IPM	
	(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)		2009	2010
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010		
SELAYAR	67,61	67,74	89,23	89,23	6,75	6,95	624,31	627,69	68,86	69,34
BULUKUMBA	71,62	71,94	85,35	85,35	6,69	6,97	629,12	632,43	70,55	71,19
BANTAENG	73,12	73,60	77,51	78,98	5,87	5,97	633,92	634,22	69,40	70,10
JENEPONTO	64,85	65,00	77,20	77,27	5,88	6,20	631,09	631,74	64,54	64,92
TAKALAR	69,17	69,52	80,75	81,80	6,23	6,42	631,82	632,01	68,04	68,62
GOWA	71,43	71,61	80,27	81,92	6,57	6,83	639,15	639,23	70,00	70,67
SINJAI	71,61	71,99	86,45	86,45	6,71	6,74	608,34	609,50	69,21	69,53
MAROS	71,71	72,30	82,90	82,97	6,50	6,62	637,20	639,12	70,55	71,12
PANGKAJENE KEPULAUAN	68,62	68,79	86,86	87,55	6,61	6,73	627,88	628,26	69,07	69,43
BARRU	68,54	68,85	88,48	89,23	7,39	7,61	632,35	632,98	70,30	70,86
BONE	69,35	69,73	84,85	84,86	6,38	6,70	638,01	639,16	69,63	70,17
SOPPENG	71,52	71,63	85,08	86,67	6,98	7,25	636,96	637,16	71,26	71,89
WAJO	70,40	70,94	82,69	83,53	6,06	6,22	637,22	639,49	69,44	70,22
SIDENRENG RAPPANG	72,07	72,50	89,57	89,63	7,24	7,25	627,99	628,61	72,06	72,37
PINRANG	71,72	72,06	89,74	89,90	7,22	7,61	637,37	638,49	72,61	73,21
ENREKANG	74,66	74,99	90,44	90,44	8,25	8,30	624,74	626,63	74,19	74,55
LUWU	73,25	73,70	91,48	91,48	7,71	7,74	629,25	630,71	73,59	73,98
TANA TORAJA	74,13	74,17	85,45	86,28	7,46	7,70	614,14	614,99	71,39	71,84
LUWU UTARA	71,34	71,56	92,05	92,36	7,04	7,46	648,64	650,85	73,65	74,32
LUWU TIMUR	70,84	70,95	93,24	93,24	7,75	8,17	624,35	626,03	72,29	72,79
TORAJA UTARA	73,49	73,54	83,03	83,80	7,03	7,22	597,86	601,89	68,92	69,56
KOTA MAKASAR	73,24	73,59	96,68	96,79	10,60	10,82	646,96	649,12	78,24	78,79
KOTA PARE PARE	73,92	74,27	97,06	97,16	9,63	9,63	640,04	641,55	77,45	77,78
KOTA PALOPO	72,25	72,47	97,32	97,33	9,73	10,03	633,02	634,17	76,11	76,55
SULAWESI SELATAN	69,80	70,00	87,02	87,75	7,41	7,84	635,48	636,60	70,94	71,62
INDONESIA	69,21	69,43	92,58	92,91	7,72	7,92	631,46	633,64	71,76	72,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

KETAHANAN PANGAN



Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten, 2009 dan Sulawesi Selatan Dalam Angka (BPS), 2010.

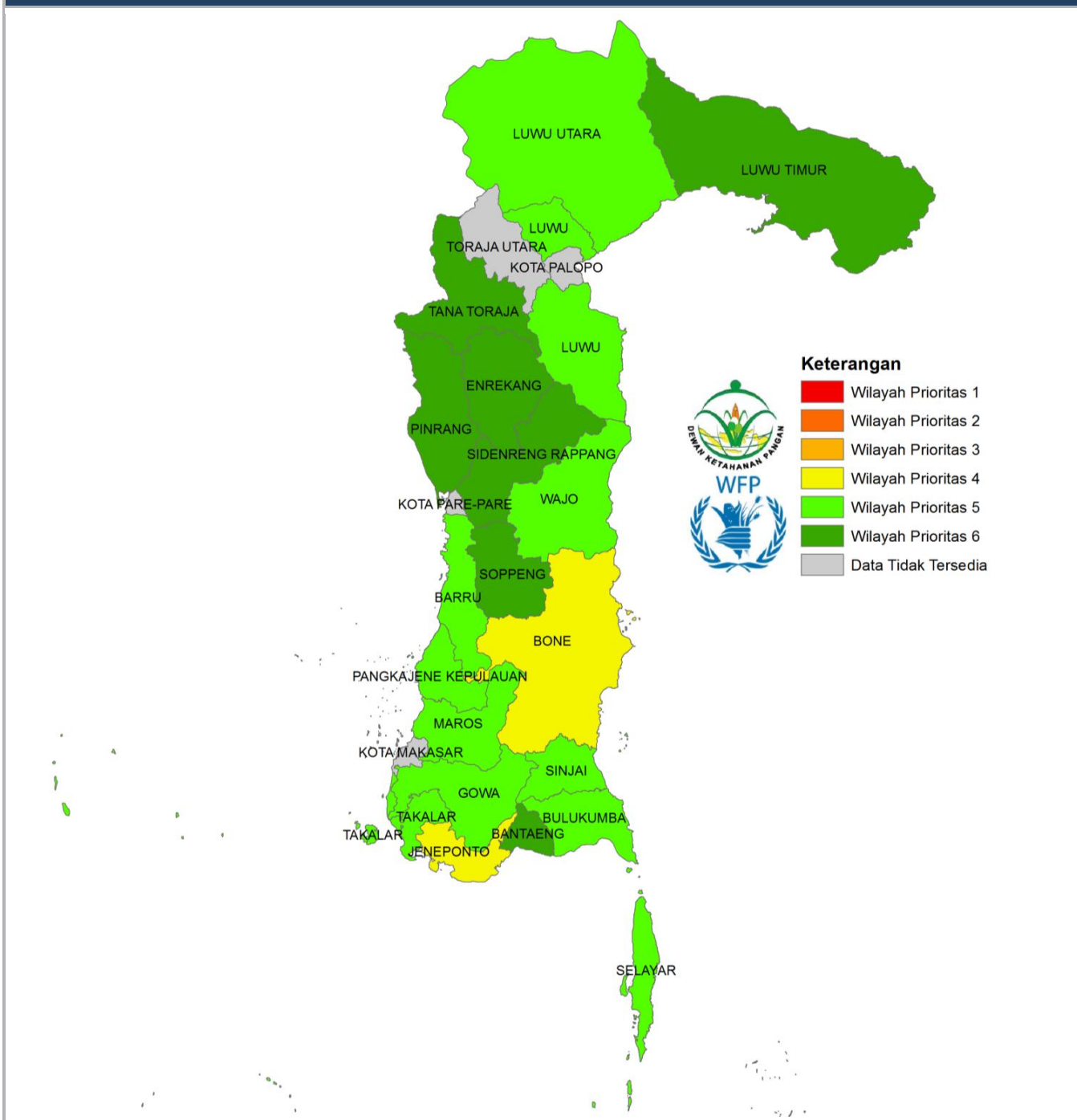
Keterangan:

- >1,5 Defisit Tinggi
- 1 – 1,5 Defisit Sedang
- 0,5 – 1 Surplus Rendah
- 0 – 0,5 Surplus Tinggi
- 0 Data Tidak Tersedia

⁵ Merupakan salah satu ukuran ketahanan pangan di tingkat Kabupaten dan Kota dan termasuk dalam Peta Kerawanan Pangan Indonesia (Food Insecurity Atlas-FIA) diperkenalkan oleh DKP, Badan Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten bekerja sama dengan World Food Programme (WFP) pada tahun 2005.

KETAHANAN PANGAN

Gambar 29
Peta Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan⁶ Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009



Sumber: Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI dan WFP, 2009

⁶ Pada tahun 2009, cakupan diperluas dari 30 provinsi di 265 kabupaten menjadi 32 provinsi dan 346 kabupaten serta merupakan konsolidasi berbagai aspek yang terkait dengan ketahanan pangan, seperti ketersediaan pangan, akses dan distribusi pangan serta gizi dan kesehatan yang dipublikasikan dengan nama "Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA)"

KETAHANAN PANGAN

Tabel 10.
Komponen Indeks Komposit Ketahanan Pangan, Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Daerah	Ketersediaan Pangan		Akses Pangan			Akses terhadap Kesehatan dan Gizi					Indeks Komposit Ketahanan Pangan (CFSI - Composite Food Security Index)
	Produksi Bersih Sereal- Kab./Kota (Kg/ kapita/ hari)	Rasio Konsumsi Normatif- Kab./Kota	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Non Elektrifikasi	Desa tanpa Akses ke Jalan (%)	Angka Buta Huruf Perempuan (%)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%)	Penduduk tanpa akses pada fasilitas sarana kesehatan (%)	Penduduk tanpa akses pada air bersih* (%)	
	2009	2009	2009	2008	2008	2009	2009	2007	2008	2009	
SELAYAR	299	1	16.41	26.23	18.92	13.39	67.61	18.0	5.41	49.76	194.7
BULUKUMBA	1,436	0.21	10.50	31.37	0.00	17.61	71.62	22.3	4.76	46.44	188.7
BANTAENG	2,417	0.12	9.96	36.09	0.00	23.49	73.12	25.1	2.99	44.40	182.1
JENEPONTO	1,642	0.18	20.58	10.46	0.00	26.04	64.85	24.3	1.77	52.85	156.4
TAKALAR	992	0.3	11.06	7.89	2.60	22.65	69.17	33.0	0.00	53.14	131.1
GOWA	1,429	0.21	10.93	14.76	0.00	21.46	71.43	24.5	1.80	45.81	150.1
SINJAI	1,009	0.3	11.37	38.35	5.00	18.67	71.61	22.2	0.00	50.14	151.9
MAROS	1,170	0.26	16.35	22.88	0.00	24.89	71.71	22.1	12.62	56.36	281.9
PANGKAJENE KEPULAUAN	565	0.53	19.35	19.15	30.39	15.66	68.62	24.8	6.86	50.93	238.0
BARRU	768	0.39	11.43	26.21	0.00	12.67	68.54	21.0	0.00	45.91	127.9
BONE	1,466	0.2	15.19	22.08	0.81	18.97	69.35	31.4	18.01	43.98	400.0
SOPPENG	1,611	0.19	9.95	20.63	0.00	14.93	71.52	17.9	2.86	37.50	145.1
WAJO	1,651	0.18	8.93	31.69	0.00	20.34	70.40	23.6	7.95	40.25	223.4
SIDENRENG RAPPANG	2,317	0.13	6.73	14.75	0.00	20.10	72.07	24.8	2.86	57.07	168.0
PINRANG	2,014	0.15	8.70	8.31	0.00	13.12	71.72	22.1	3.85	51.54	160.3

KETAHANAN PANGAN

Daerah	Ketersediaan Pangan		Akses Pangan			Akses terhadap Kesehatan dan Gizi				Indeks Komposit Ketahanan Pangan (CFSI - Composite Food Security Index)	
	Produksi Bersih Sereal-sereal/Kota (Kg/ kapita/ hari)	Rasio Konsumsi Normatif-Kab./Kota	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Non Elektrifikasi	Desa tanpa Akses ke Jalan (%)	Angka Buta Huruf Perempuan (%)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%)	Penduduk tanpa akses pada fasilitas sarana kesehatan (%)		Penduduk tanpa akses pada air bersih* (%)
	2009	2009	2009	2008	2008	2009	2009	2007	2008	2009	
ENREKANG	557	0.54	18.10	15.81	0.78	15.94	74.66	19.9	7.75	52.75	210.9
LUWU	1,146	0.26	16.96	39.08	0.00	13.18	73.25	21.4	16.74	59.59	324.8
TANA TORAJA	406	0.74	16.14	37.38	0.00	19.42	74.13	21.3	27.74	69.58	447.3
LUWU UTARA	724	0.41	16.40	42.69	0.00	13.45	71.34	19.9	14.77	58.72	294.9
LUWU TIMUR	916	0.33	8.91	35.32	1.98	9.77	70.84	18.2	0.00	48.92	136.2
TORAJA UTARA***							73.49				58.9
KOTA MAKASAR**			5.52	1.86	2.80	5.22	73.24	23.3	0.00	2.98	72.6
KOTA PARE-PARE**			6.52	0.61	0.00	6.39	73.92	19.0	0.00	25.56	88.9
KOTA PALOPO**			11.85	5.55	0.00	4.84	72.25	16.8	0.00	22.29	90.5

Sumber: Badan Pusat Statistik 2011, Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI dan WFP, 2009.

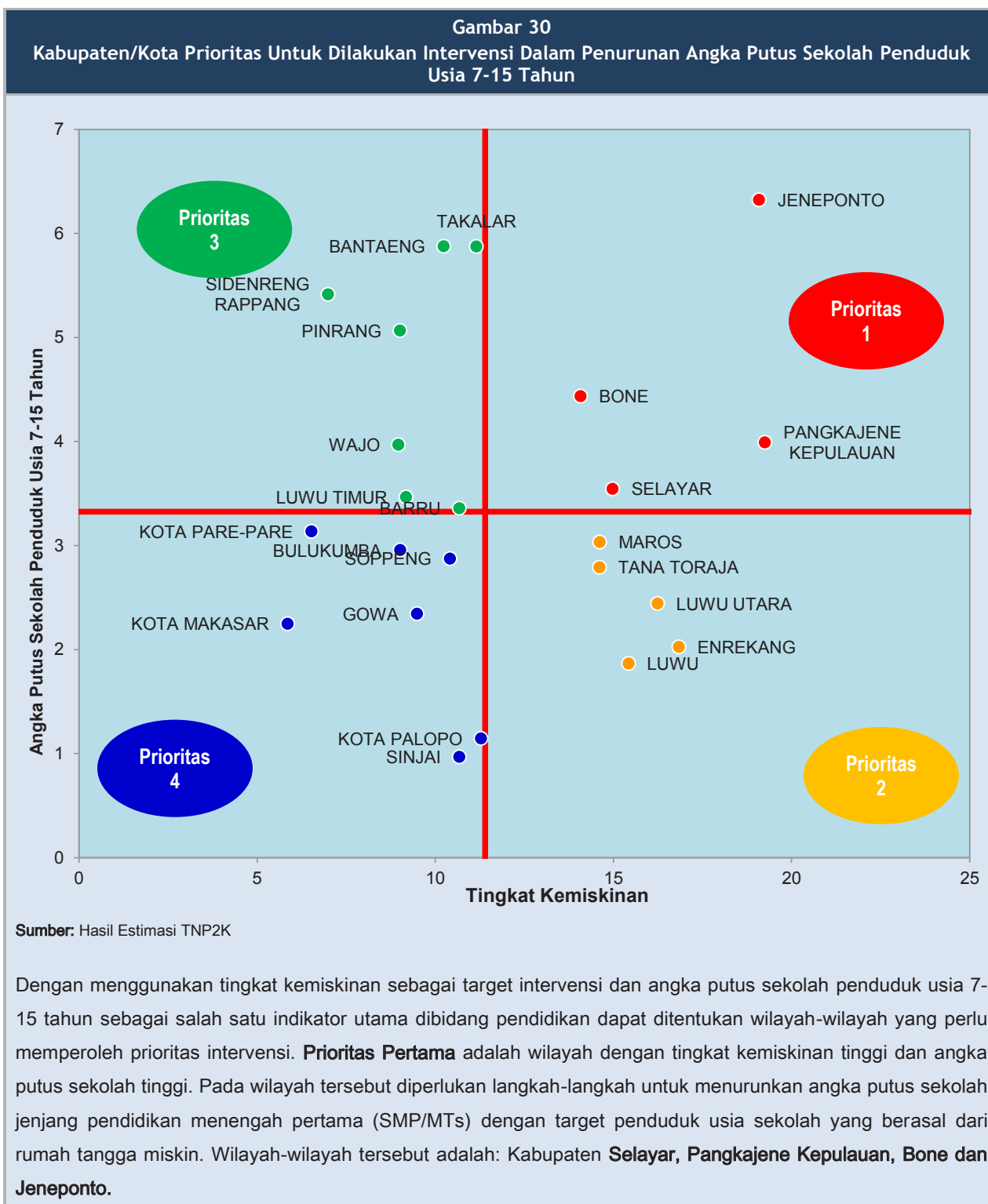
Keterangan:

*Air Bersih dihitung dengan menggunakan kontrol jarak dari tempat pembuangan kotoran/limbah

** Terdapat beberapa komponen dari Indeks Komposit Ketahanan Pangan (CFSI - Composite Food Security Index) yang tidak terhitung karena belum terdata secara lengkap.

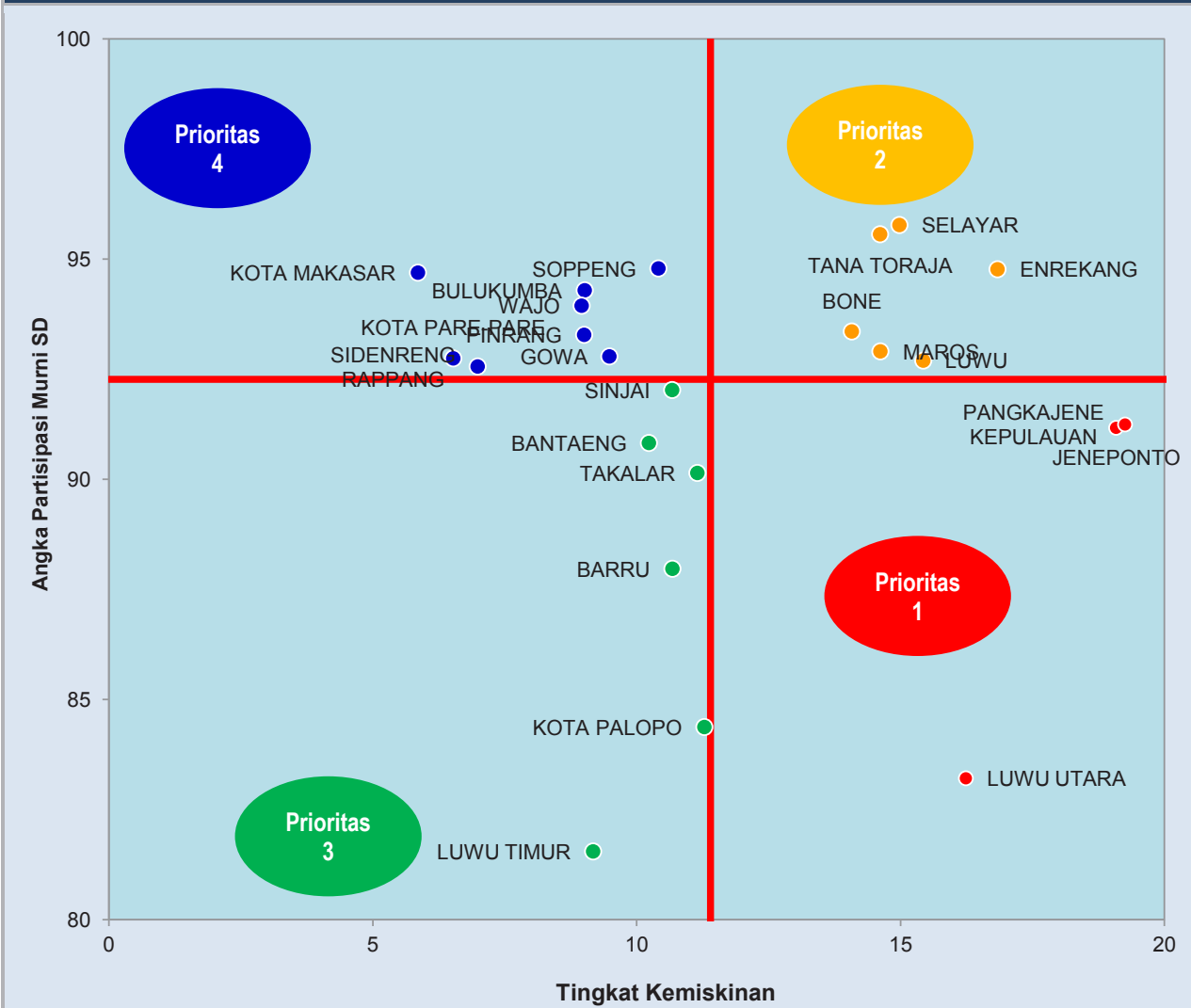
*** Data tidak tersedia (wilayah pemekaran).

PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN



PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN

Gambar 31
Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI)

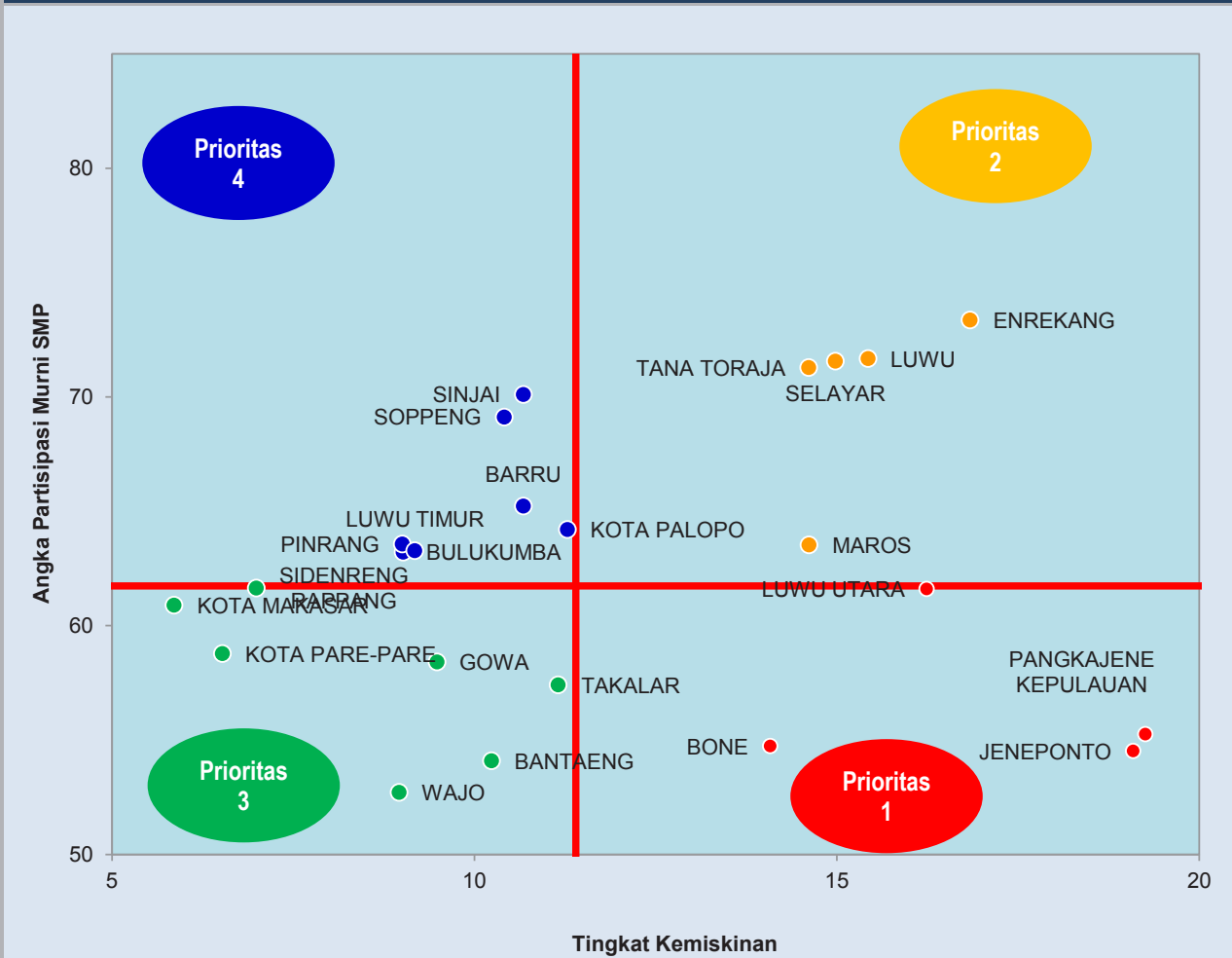


Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan angka partisipasi murni (APM) sebagai salah satu indikator utama dibidang pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas Pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan APM SD/MI rendah. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan APM sekolah jenjang pendidikan dasar (SD/MI) dengan target penduduk usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin, wilayah tersebut adalah Kabupaten **Luwu Utara, Jenepono dan Pangkajene Kepulauan**.

PRIORITAS BIDANG KESEHATAN

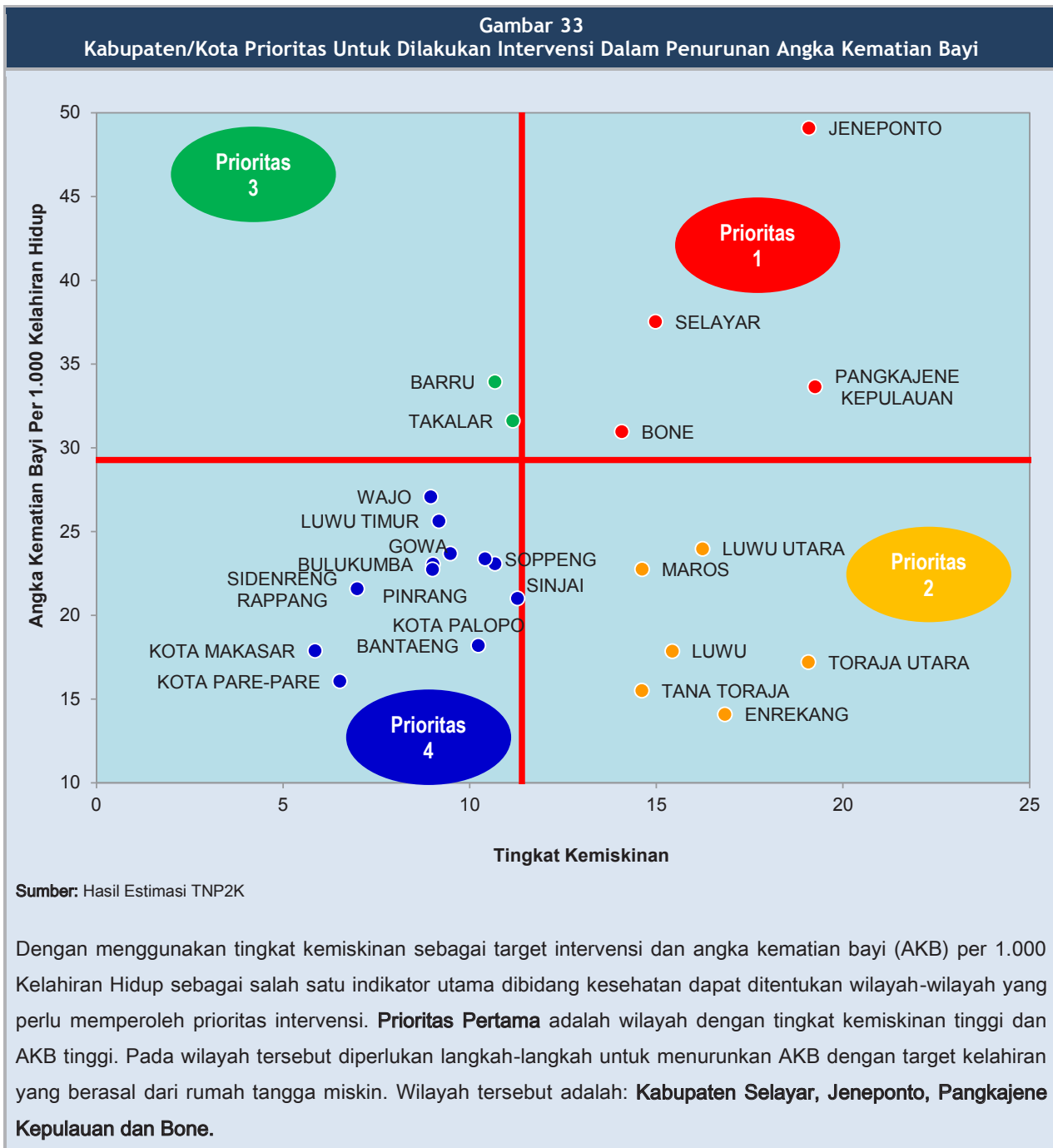
Gambar 32
Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Menengah Pertama



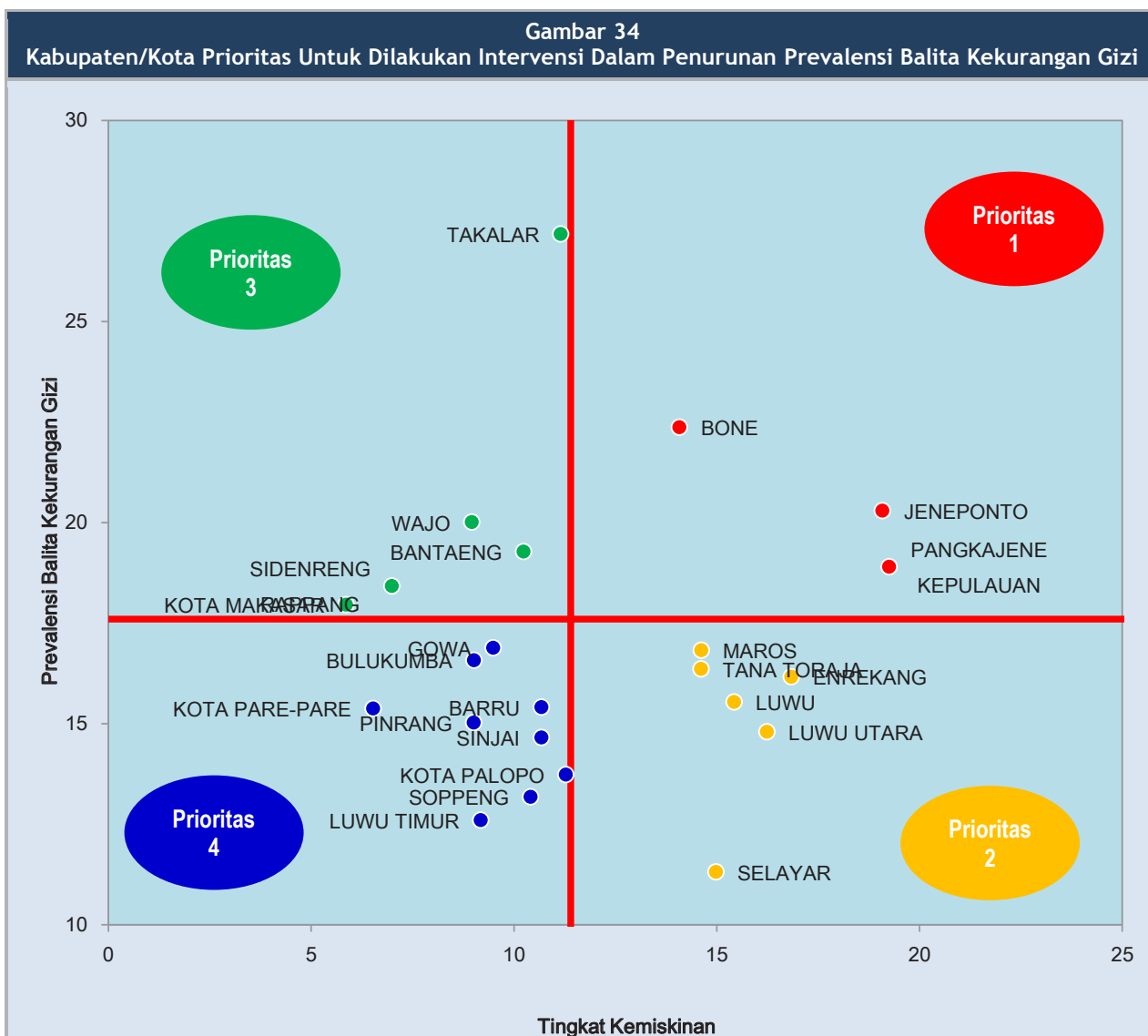
Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan angka partisipasi murni (APM) sebagai salah satu indikator utama dibidang pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas Pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan APM SMP/MTs rendah. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan APM sekolah jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs) dengan target penduduk usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin, wilayah tersebut adalah **Kabupaten Luwu Utara, Pangkajene Kepulauan, Jeneponto dan Bone.**

PRIORITAS BIDANG KESEHATAN



PRIORITAS BIDANG KESEHATAN

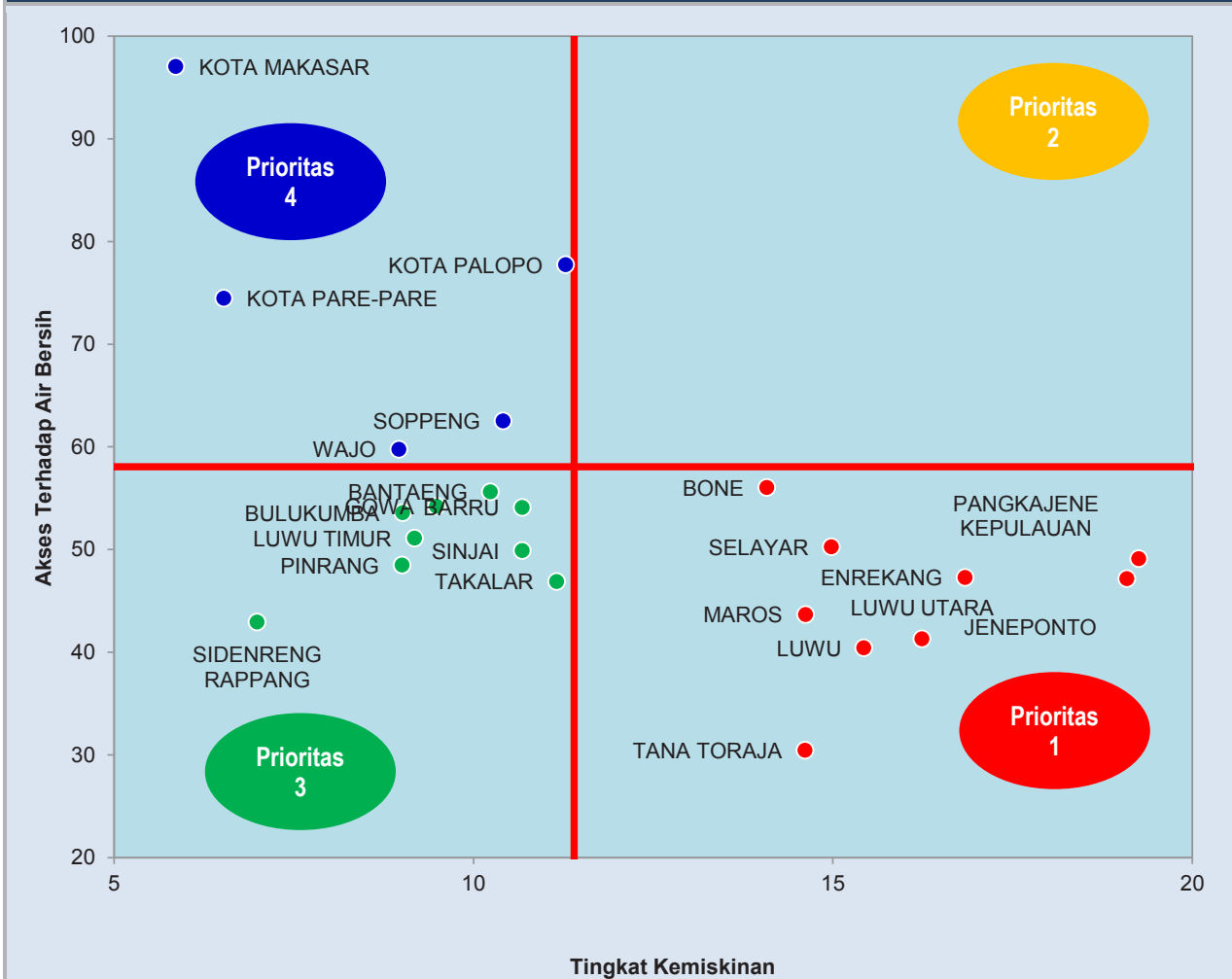


Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan prevalensi balita kekurangan gizi sebagai salah satu indikator utama dibidang kesehatan dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas Pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan prevalensi balita kekurangan gizi tinggi. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk menurunkan prevalensi balita kekurangan gizi dengan target balita yang berasal dari rumah tangga miskin. Wilayah-wilayah tersebut diantaranya adalah: **Kabupaten Bone, Jeneponto, dan Pangkajene Kepulauan.**

PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR

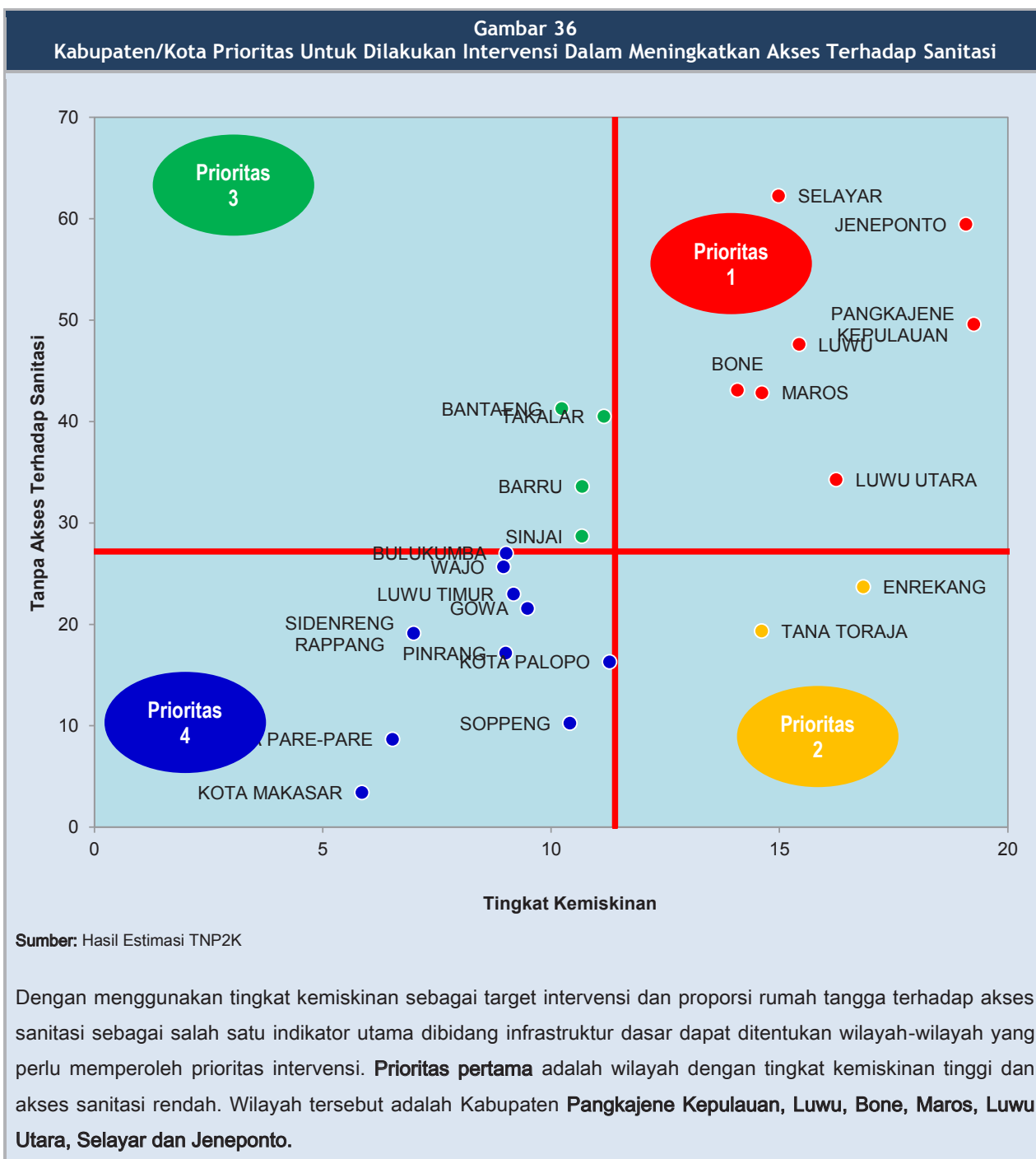
Gambar 35
Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Air Bersih



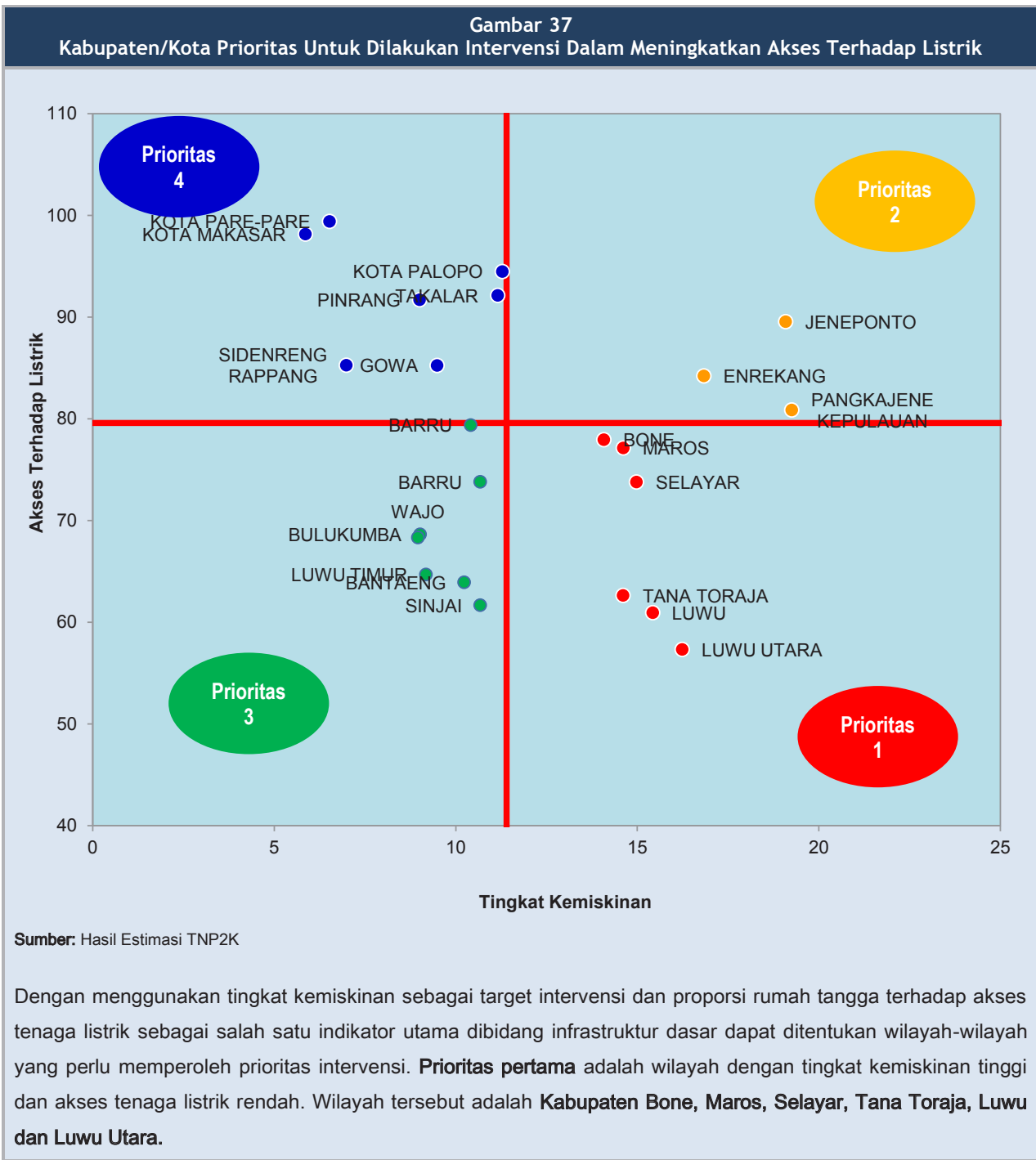
Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan proporsi rumah tangga terhadap akses air bersih sebagai salah satu indikator utama dibidang infrastruktur dasar dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas Pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses air bersih rendah. Wilayah-wilayah tersebut adalah: Kabupaten Bone, Selayar, Enrekang, Luwu Utara, Jeneponto, Pangkajene Kepulauan, Maros, Luwu dan Tana Toraja.

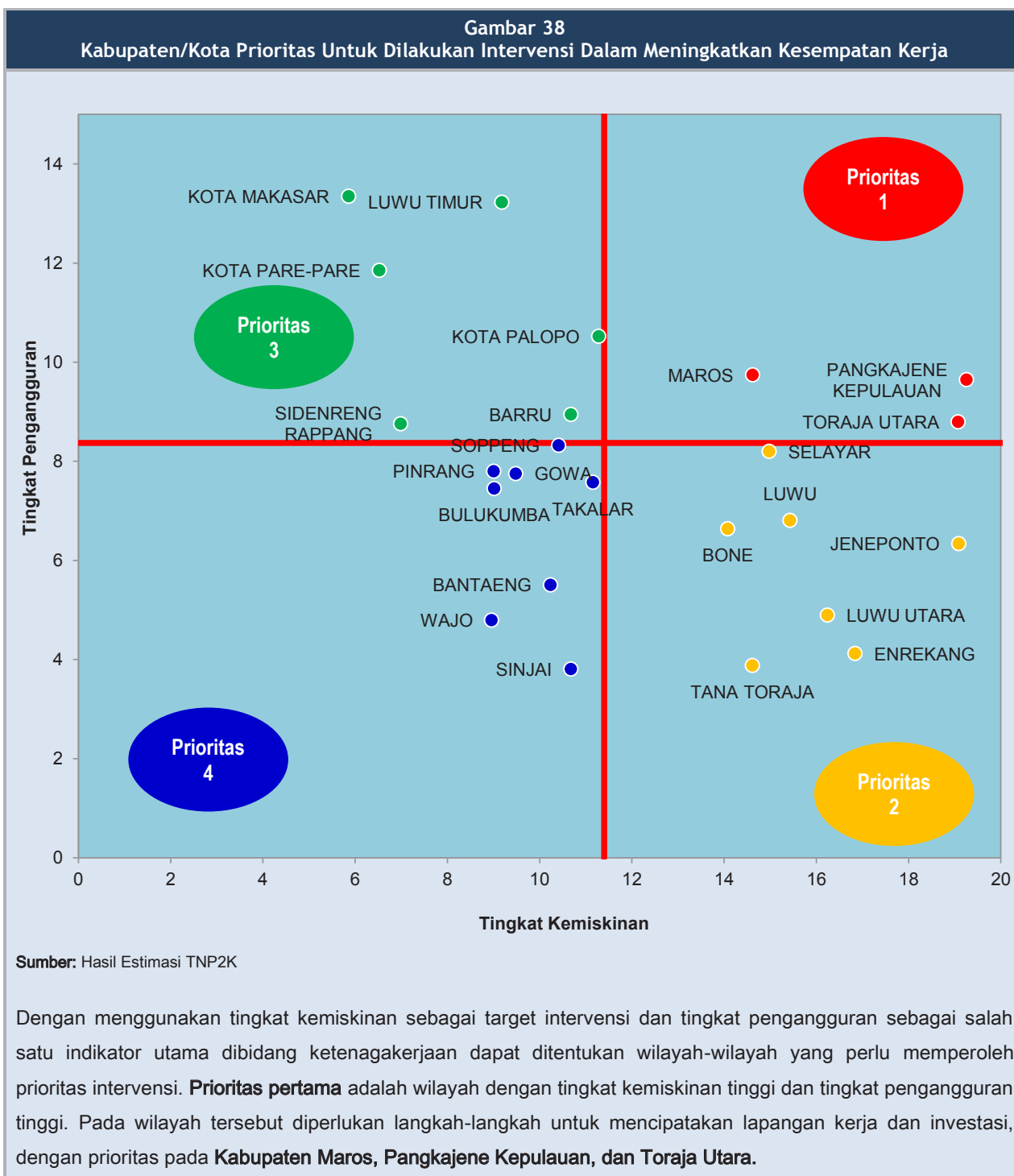
PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



PRIORITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN



BIDANG-BIDANG PRIORITAS KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tabel 11
Rekapitulasi Prioritas Intervensi Menurut Kabupaten Kota⁷

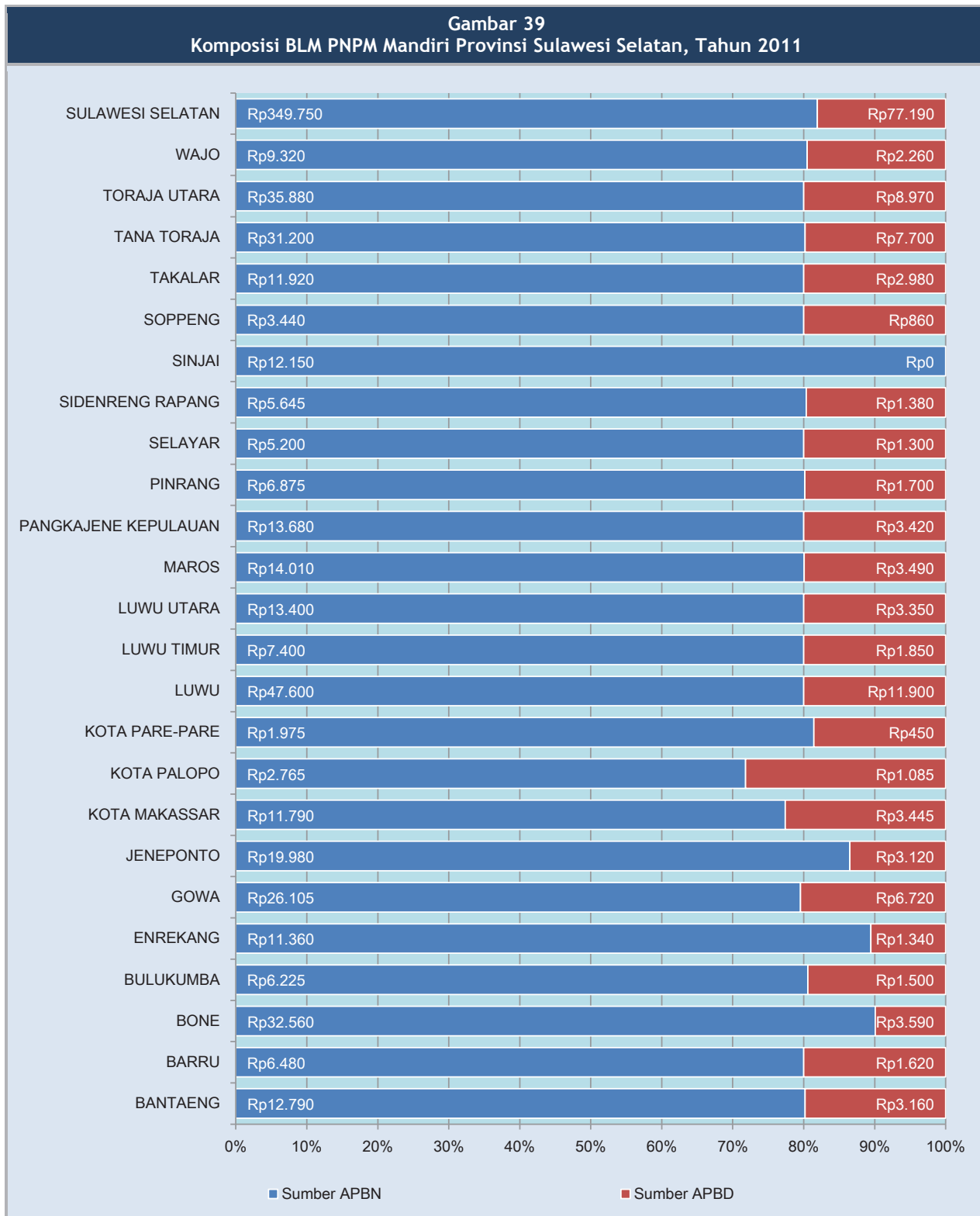
Kabupaten/Kota	Angka Putus Sekolah Usia 7-15 Th	Angka Partisipasi Murni SD/MI	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	AKB Per 1.000 Kelahiran Hidup	Prevalensi Balita Kurang Gizi	Akses Terhadap Air Bersih	Akses Terhadap Sanitasi	Akses Terhadap Listrik	Tingkat Pengang-guran
PANGKAJENE KEPULAUAN	1	1	1	1	1	1	1	2	1
BONE	1	2	1	1	1	1	1	1	2
JENEPONTO	1	1	1	1	1	1	1	2	2
LUWU UTARA	2	1	1	2	2	1	1	1	2
SELAYAR	1	2	2	1	2	1	1	1	2
MAROS	2	2	2	2	2	1	1	1	1
LUWU	2	2	2	2	2	1	1	1	2
TORAJA UTARA	2			2					1
TANA TORAJA	2	2	2	2	2	1	2	1	2
ENREKANG	2	2	2	2	2	1	2	2	2
BANTAENG	3	3	3	4	3	3	3	3	4
BARRU	3	3	4	3	4	3	3	3	3
TAKALAR	3	3	3	3	3	3	3	4	4
LUWU TIMUR	3	3	4	4	4	3	4	3	3
SIDENRENG RAPPANG	3	4	3	4	3	3	4	4	3
SINJAI	4	3	4	4	4	3	3	3	4
WAJO	3	4	3	4	3	4	4	3	4

⁷ Kabupaten/Kota dalam table di atas diurutkan berdasarkan rata-rata skor nilai Prioritas 1 hingga Prioritas 4.

BIDANG-BIDANG PRIORITAS KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kabupaten/Kota	Angka Putus Sekolah Usia 7-15 Th	Angka Partisipasi Murni SD/MI	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	AKB Per 1.000 Kelahiran Hidup	Prevalensi Balita Kurang Gizi	Akses Terhadap Air Bersih	Akses Terhadap Sanitasi	Akses Terhadap Listrik	Tingkat Pengang-guran
KOTA MAKASAR	4	4	3	4	3	4	4	4	3
BULUKUMBA	4	4	4	4	4	3	4	3	4
GOWA	4	4	3	4	4	3	4	4	4
KOTA PALOPO	4	3	4	4	4	4	4	4	3
KOTA PARE-PARE	4	4	3	4	4	4	4	4	3
PINRANG	3	4	4	4	4	3	4	4	4
SOPPENG	4	4	4	4	4	4	4	3	4

Sumber: Hasil Estimasi TNP2K



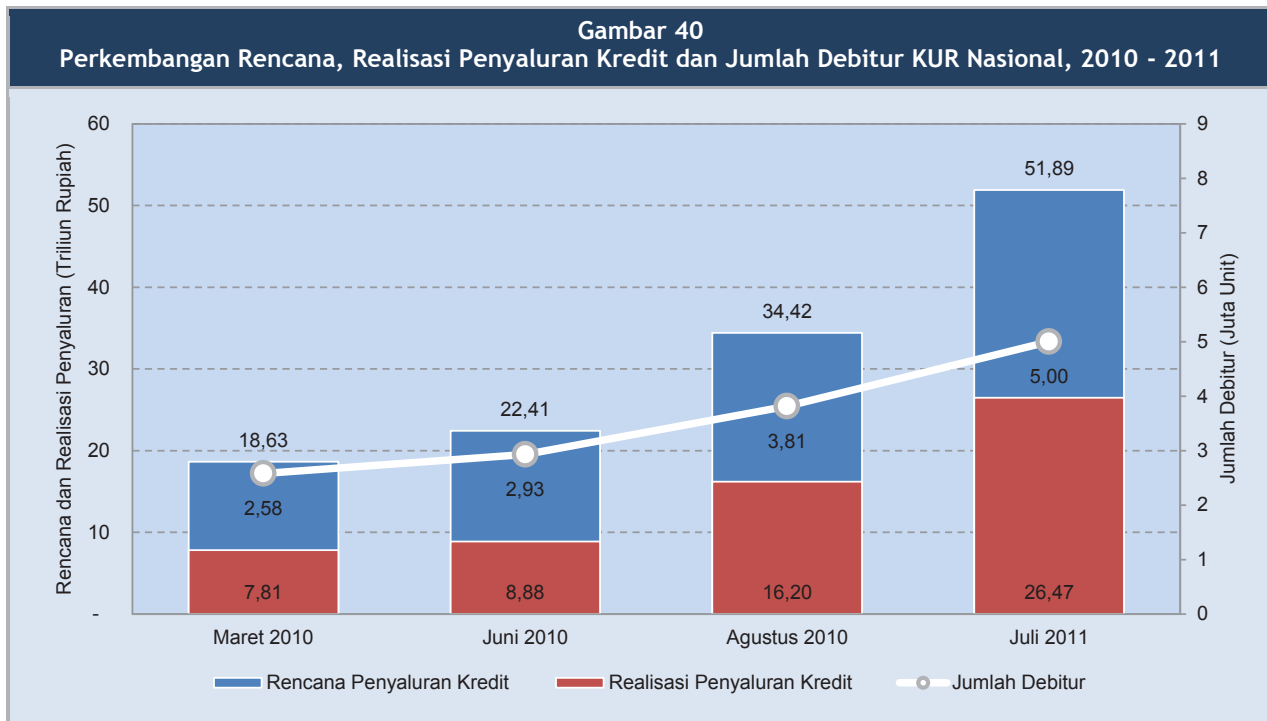
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011.

Tabel 12.
Komposisi BLM PNPM Mandiri Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah), Tahun 2011

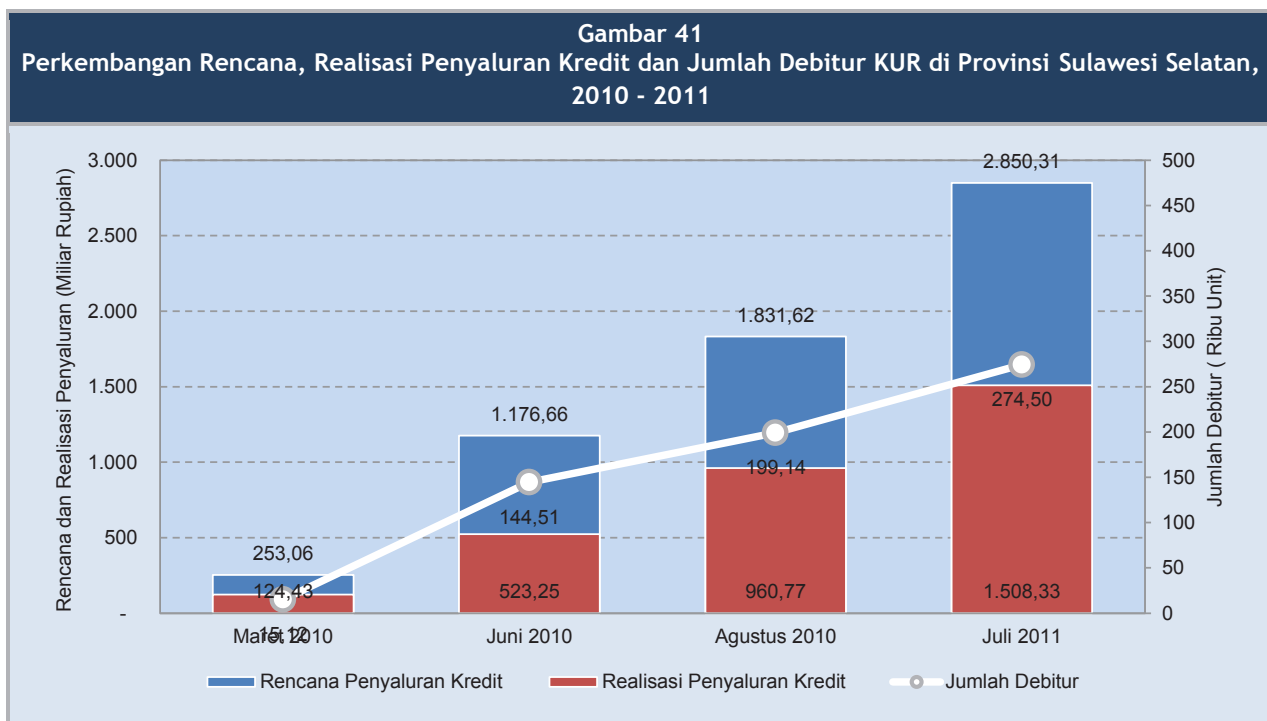
Daerah	PNPM Perdesaan	PNPM Perkotaan	PNPM PISEW	Total Alokasi BLM	Sumber APBN	Sumber APBD	Jumlah Kecamatan
	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Kec.
BANTAENG	15.200	750		15.950	12.790	3.160	8
BARRU	8.100			8.100	6.480	1.620	7
BONE	17.950	200	18.000	36.150	32.560	3.590	27
BULUKUMBA	7.500	225		7.725	6.225	1.500	10
ENREKANG	6.700		6.000	12.700	11.360	1.340	12
GOWA	31.200	1.625		32.825	26.105	6.720	18
JENEPONTO	15.600		7.500	23.100	19.980	3.120	11
KOTA MAKASSAR		15.235		15.235	11.790	3.445	15
KOTA PALOPO		3.850		3.850	2.765	1.085	9
KOTA PARE-PARE		2.425		2.425	1.975	450	4
LUWU	59.500			59.500	47.600	11.900	21
LUWU TIMUR	9.250			9.250	7.400	1.850	11
LUWU UTARA	16.750			16.750	13.400	3.350	11
MAROS	16.650	850		17.500	14.010	3.490	14
PANGKAJENE KEP.	17.100			17.100	13.680	3.420	13
PINRANG	8.000	575		8.575	6.875	1.700	12
SELAYAR	6.350	150		6.500	5.200	1.300	11
SIDENRENG RAPANG	5.700	1.325		7.025	5.645	1.380	11
SINJAI		150	12.000	12.150	12.150	0	9
SOPPENG	4.300			4.300	3.440	860	8
TAKALAR	14.900			14.900	11.920	2.980	9
TANA TORAJA	38.500	400		38.900	31.200	7.700	20
TORAJA UTARA	44.850			44.850	35.880	8.970	19
WAJO	8.550	3.030		11.580	9.320	2.260	14
SULAWESI SELATAN	161.750	24.310	31.500	217.560	179.630	37.930	142

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011.

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

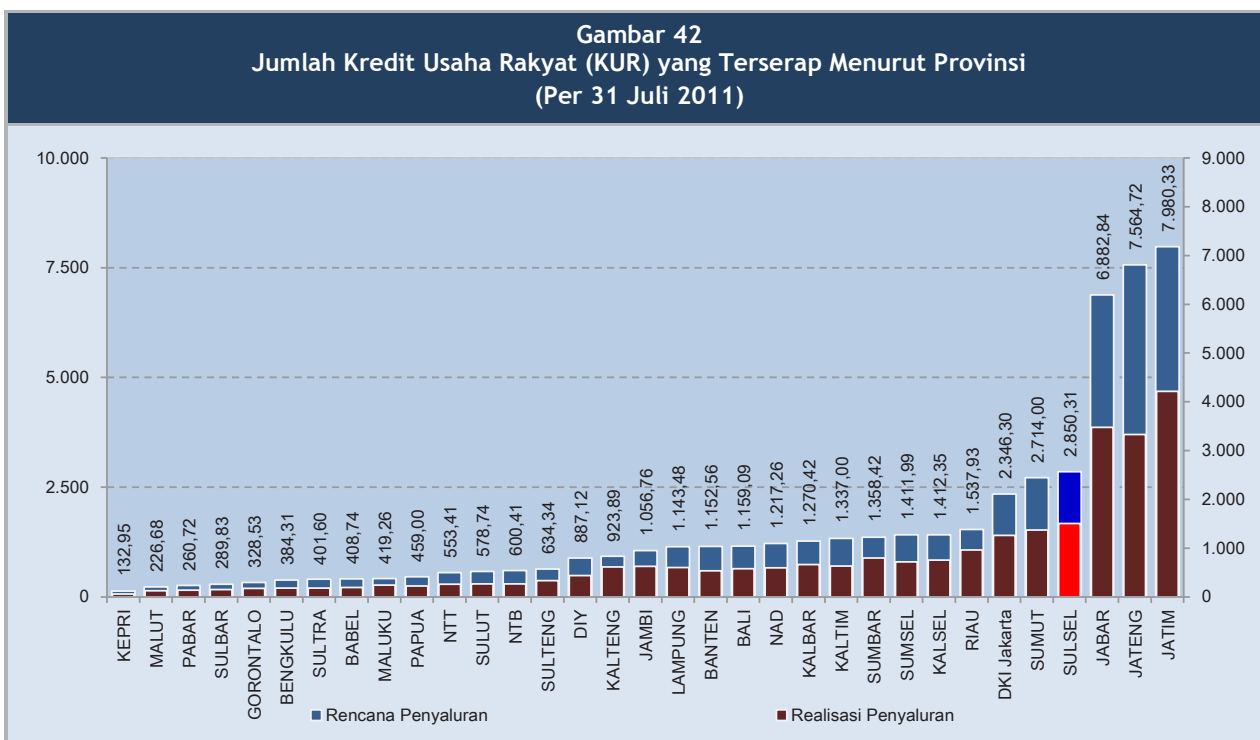


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

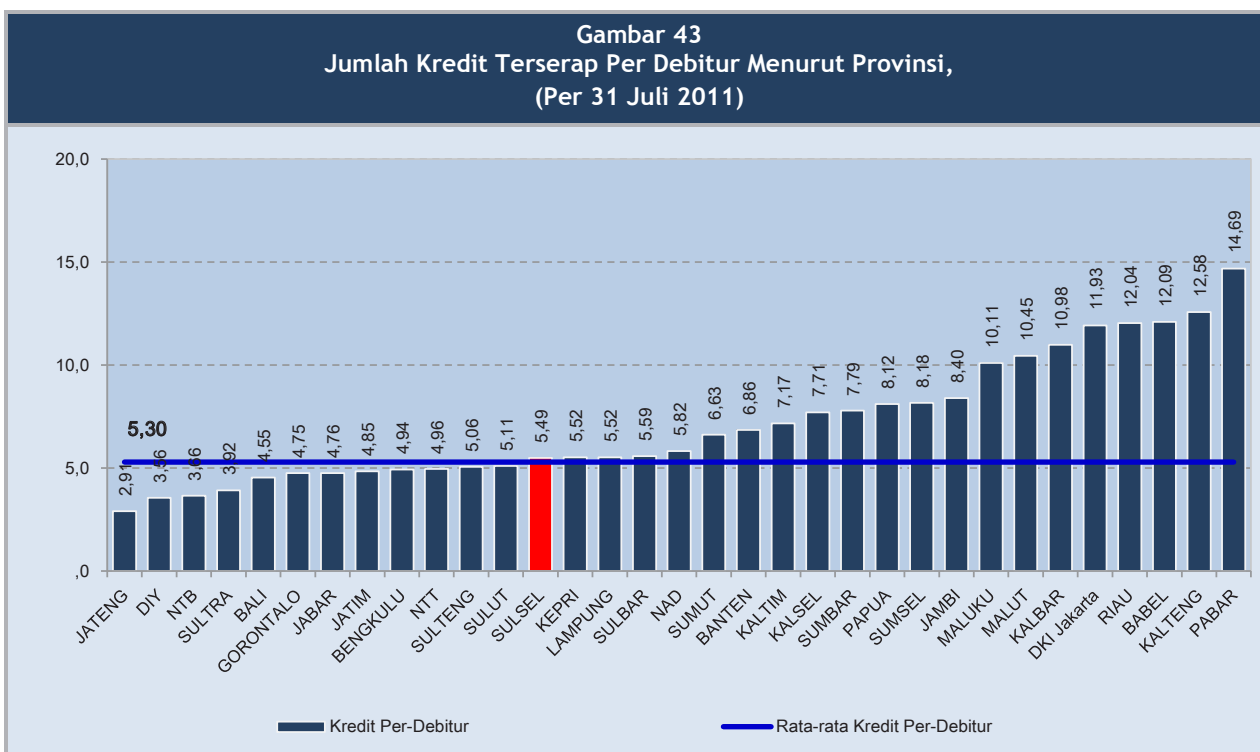


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

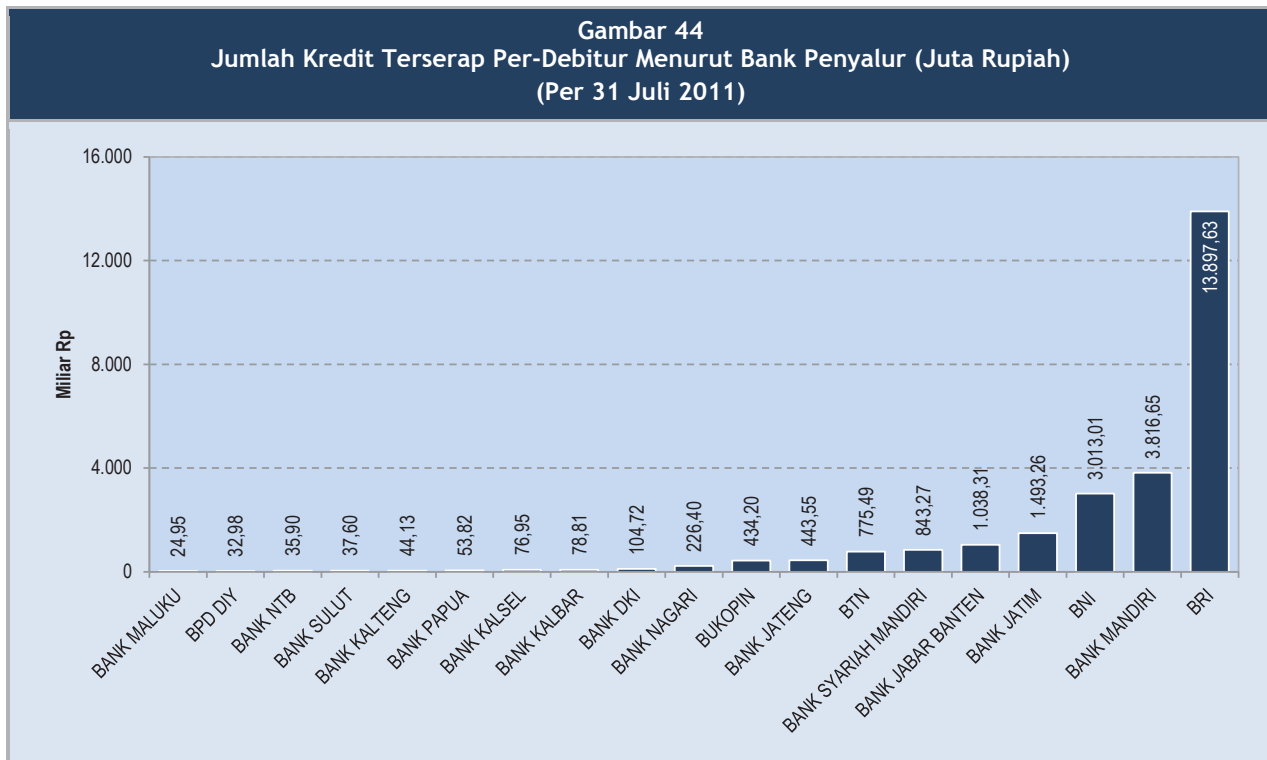


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

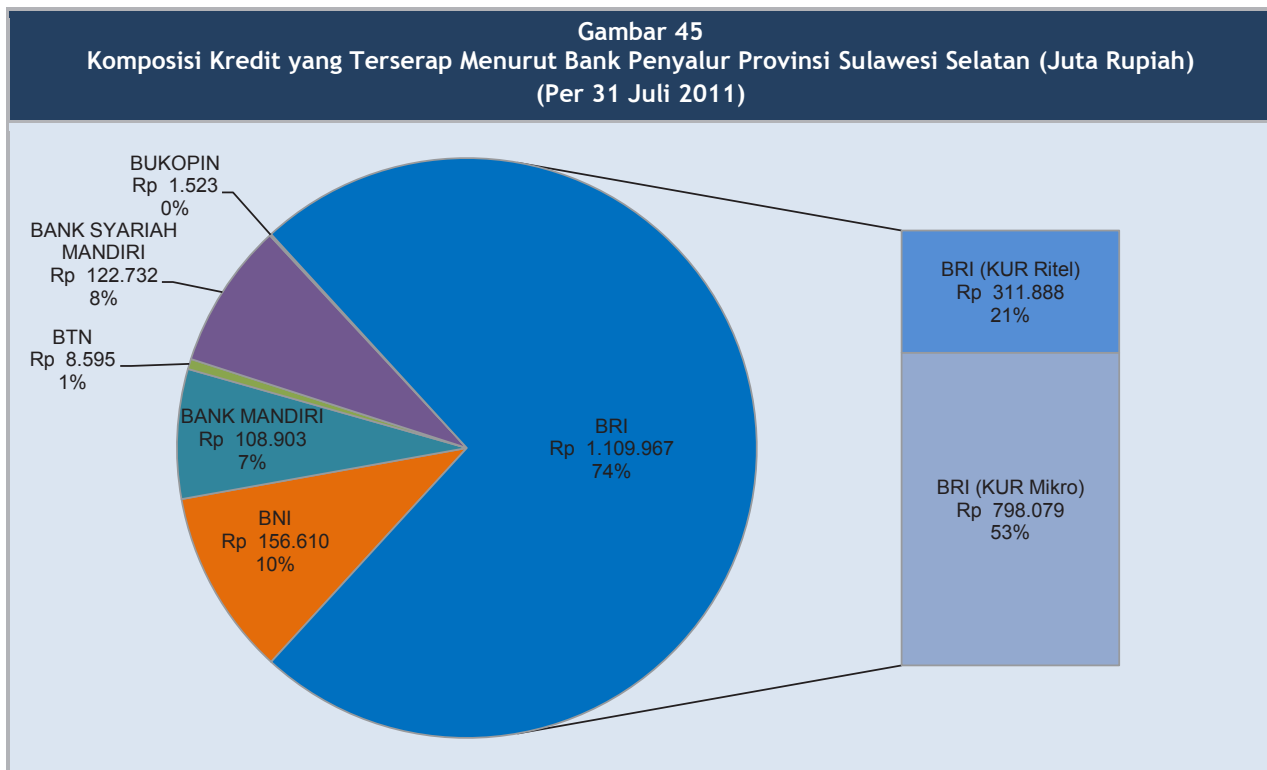


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

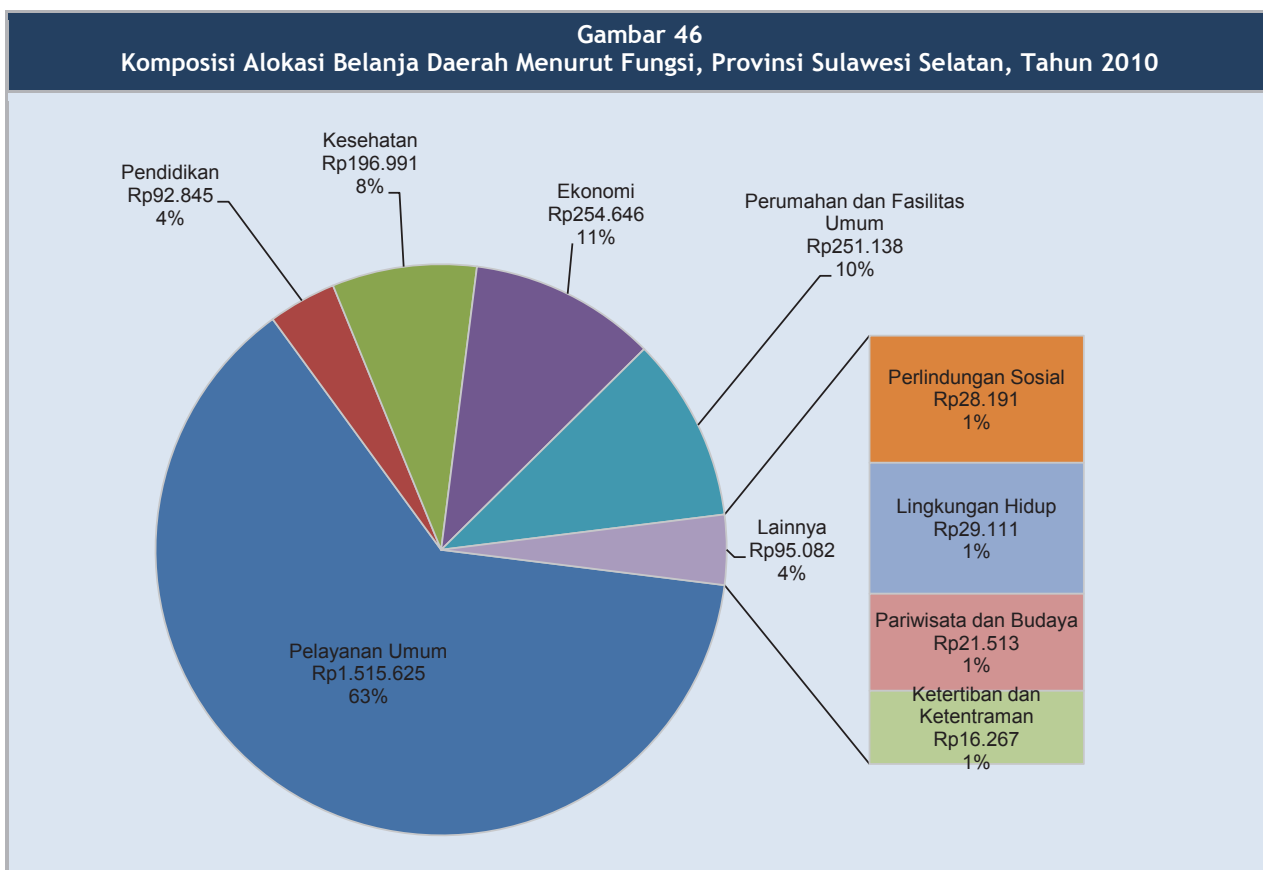


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

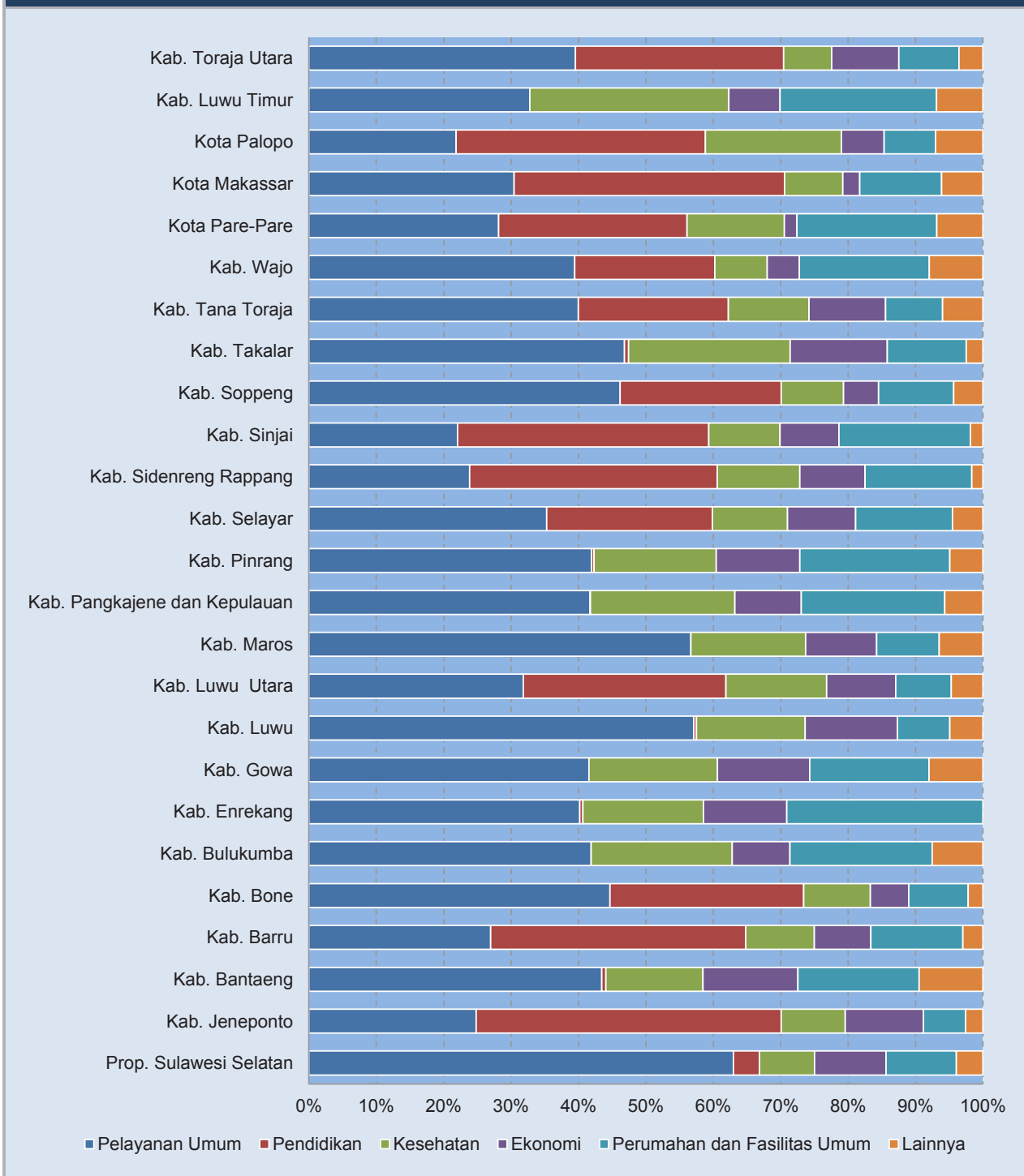
ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2010

ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Gambar 47
Komposisi Alokasi Belanja Daerah Menurut Fungsi dan Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2010



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2010

Keterangan: Komposisi Alokasi Belanja Daerah merupakan angka Anggaran Tahun 2010 (Bukan nilai realisasi).